

KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Niko Setyahadi
NIM : 042114080

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009

Skripsi

**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten

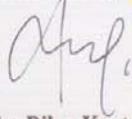
Oleh:

Niko Setyahadi

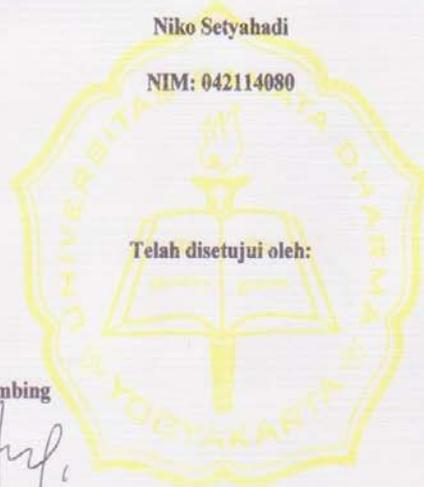
NIM: 042114080

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Antonius Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA. Tanggal: 5 Juni 2009



SKRIPSI
**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Niko Setyahadi

042114080

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 24 Juli 2009
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

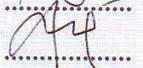
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., MSi., Akt., QIA.

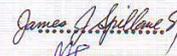
Anggota : A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA.

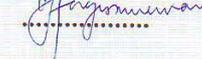
Anggota : Dr. James J. Spillane, S.J.

Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanda Tangan

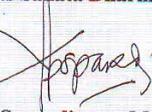

.....

.....




.....

Yogyakarta, 31 Juli 2009
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma




(Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tak ada waktu kita untuk berduka, kenyataan ini tak bisa dihindari,
mulai bekerja menghadapi tantangannya.

Kehancuran awal pertumbuhan, semua beban bunga kehidupan,
kepedihan kembang kebahagiaan.

Tak ada persoalan yang tak terselesaikan, tak ada badai yang tak
berhenti.

Ahmad Albar (God Bless)

Live is double-side:

There's a wrong side and a right side, a sad side and a happy side.

There's a good side and a bad side, a black side and a bright side.

So if things seem dark to you, just change your thoughts about.

Live will look quite different if you turn in best side out.

pravsworld

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Bunda Maria seta putraNya Yesus Kristus, sujud syukur atas
berkah kebaikanNya kepada penulis,
 - Bapak, Ibu, Kakak, dan Adikku,
 - Dan seseorang yang kucintai,.... Thank's for being my special one,
- Semua orang yang telah membantuku dan keluargaku.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten \Klaten dan dimajukan untuk diuji pada tanggal Juli 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 26 Juni 2009

Yang membuat pernyataan,

(Niko Setyahadi)

ABSTRAK

KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten

Niko Setyahadi
042114080
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Selain mengukur kontribusi, penelitian ini juga untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pendapatan pariwisata, serta mengukur korelasi antara pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efektivitas, analisis efisiensi, serta korelasi *product moment*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada periode tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2007, dapat diketahui rata-rata kontribusi 1,98%, rata-rata efektivitas 101,40 %, rata-rata efisiensi 498,19%, dan analisis korelasi menunjukkan nilai $r = -0,638$ yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dengan pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF TOURISM SECTOR TOWARD REGIONAL ORIGINAL REVENUE PRODUCT

A Case Study at Klaten Regency

Niko Setyahadi
042114080
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2009

This research was aimed to identify the contribution amount of tourism sector income to regional revenue of Klaten regency. Besides that, this research is meant was also recognize the effectiveness and efficiency of the tourism sector income and also to measure the correlation between tourism sector income and regional original revenue.

The techniques of data collection ware interview and documentation. The data analysis techniques were contribution analysis, effectiveness analysis, efficiency analysis and product moment correlation.

Based on the analysis that had been done for the budget years of 2003-2007, it could be recognized that the contribution average was 1,98%, the efficiency average was 498,19% and the correlation analysis showed that $r: -0,638$ which was not significant, so that it could be concluded that there was no relation between tourism sector income and regional original revenue.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Niko Setyahadi

Nomor Mahasiswa : 042114080

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2009

Yang menyatakan



(Niko Setyahadi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dari lubuk hati yang paling dalam penulis panjatkan kepada Bunda Maria serta PutraNya Yesus Kristus atas segala berkah, karunia, serta kebaikanNya karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.”

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
2. Antonius Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA., selaku dosen pembimbing yang dalam kesibukannya telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat selesai.
3. Seluruh dosen yang telah membimbing penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
4. Bu Wahyu selaku Bendahara Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten, yang bersedia meluangkan waktu untuk mendukung penyelesaian skripsi.

5. Teman Offroadku Mas Yoyo, yang juga selaku staf Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, yang banyak membantu penulis dalam diskusi dan pemerolehan data.
6. Bapakku Victor Suyamta dan Ibuku Fransiska Susilowati yang senantiasa memberikan kesempatan, bimbingan dan kasih sayangnya pada penulis dari waktu masih kecil sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Mas Boni, atas semua dukungannya sebagai kakak yang baik dan Adikku Weny yang telah dengan sabar mengharapkan agar penulis cepat lulus.
8. Dian, yang dengan sabar memberikan doa, semangat, serta dukungan penuh kasih sayangnya kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi ini.
9. Om Tris sekeluarga, yang memberikan fasilitas tempat tinggal gratis selama penulis kuliah dan juga Ronie, terima kasih telah banyak membantu penulis.
10. Sahabatku Aswin, terima kasih Bung atas semuanya, dan juga teman-teman sekelas MPT, Heri Bun-bun, Cinta, Elkana, Anggi, Ette, Wima, Rita, dan Nawan sukses buat kita semua.
11. Teman-temanku di kampus: Beny, Anton, Bobby, Ngadul, Gareng, Arek, Didik, Lia, Ratih, Paula, Dwita, Oscar dan teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
12. Keluarga Besar Mapasadha, dimana penulis bisa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang tidak diperoleh di bangku kuliah.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis menerima kritik, koreksi, dan saran dari pembaca yang mengarah pada kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 26 Juni 2009

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Niko Setyahadi', written on a light-colored background.

Niko Setyahadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pajak Daerah	7
1. Pengertian Pajak Daerah	7
2. Prinsip-prinsip Perpajakan Daerah	8
3. Jenis Pajak Daerah	9
4. Ciri-ciri Perpajakan Daerah	10
B. Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	10
1. Pendahuluan	10
2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Keuangan Daerah	11
C. Pendapatan Asli Daerah	14
D. Pariwisata	15
1. Pengertian	15
2. Usaha-usaha yang Terkait di Bidang Pariwisata	16
E. Pendapatan Sektor Pariwisata	17
1. Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata	17
2. Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataa .	21
F. Efektivitas, Efisiensi, dan Korelasi	27
1. Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata	27
2. Efisiensi Biaya Sektor Pariwisata	29
3. Korelasi antara Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	30
G. Review Penelitian Sebelumnya	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Subyek Penelitian	36
D. Obyek Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Wawancara	37
2. Dokumentasi	37
F. Data yang Diperlukan	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN	42
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Klaten	42
B. Kondisi Fisik	42
1. Letak dan Luas Wilayah	42
2. Topografi	44
3. Penggunaan Lahan	45
4. Iklim	47
C. Pariwisata	48
1. Kepariwisata	48
2. Pengelola Pariwisata di Kabupaten Klaten	49
3. Obyek dan Daya Tarik Wisata	51
4. Kunjungan Obyek Wisata Kabupaten Klaten	67
D. Pendidikan	68
E. Kondisi Ekonomi	68
1. Keuangan Daerah	68
2. Pertanian	70
F. Kondisi Sosial Budaya	74
1. Kependudukan	74
2. Ketenagakerjaan	74
3. Kebudayaan	75
4. Agama	75
G. Pemerintahan	75
1. Wilayah Administrasi	75
2. Kepegawaian	76
3. Organisasi Daerah	76
4. Pertanahan.....	77
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	78
A. Analisis Data	78
1. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	78
2. Efektivitas Pendapatan Pariwisata.....	79
3. Efisiensi Belanja Sektor Pariwisata.....	80
4. Korelasi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan	

Asli Daerah	83
B. Pembahasan	85
1. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	85
2. Efektivitas Pendapatan Pariwisata	86
3. Efisiensi Belanja Sektor Pariwisata	87
4. Korelasi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	87
 BAB VI PENUTUP	 88
A. Kesimpulan	88
B. Keterbatasan Penelitian	89
C. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	 92
 LAMPIRAN	 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah, berkaitan dengan pemerintahan daerah dan keuangan daerah untuk mengatur keuangan daerahnya secara lebih mandiri, hal ini diwujudkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Undang-undang No. 18 Tahun 1997, dan Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan asas Keadilan dan asas Manfaat (Ibnu Syamsi, 1993).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi, faktor-faktor tersebut adalah : kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor *essensial* untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pamudji yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak dapat

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

Dari keadaan tersebut maka pemerintah daerah harus mengetahui sumber-sumber penerimaan PAD yang dapat memberikan sumbangan tinggi dalam meningkatkan daerahnya, salah satunya adalah Pendapatan Sektor Pariwisata.

Setiap kabupaten memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan perangkat yang sangat penting di dalam pembangunan daerah dalam otonomi daerah sekarang ini. Artinya bahwa bidang pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi pengembangan suatu daerah terlebih lagi dengan era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli suatu daerah (PAD). Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau

manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memperkenalkan seni budaya daerah dan hasil kerajinan daerah untuk dapat dipasarkan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, dan yang tidak kalah penting adalah dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang terletak di Propinsi Jawa Tengah yang banyak mempunyai potensi pariwisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, kesenian tradisional, upacara tradisional serta tempat-tempat bersejarah lainnya. Secara umum potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Klaten belum mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar serta pelaku wisata (Arison, 2005). Merupakan hal yang sangat ironis dimana Klaten mempunyai potensi pariwisata yang cukup banyak, tetapi manfaat atau keuntungan yang diperoleh kurang optimal sebagai akibat kurangnya upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten.

Bertitik tolak dari pentingnya PAD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sehingga dapat mengetahui kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah?

2. Apakah pendapatan dari Sektor Pariwisata sudah efektif?
3. Apakah pendapatan dari Sektor Pariwisata sudah efisien?
4. Bagaimana hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dengan PAD?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penerimaan dan kontribusi pendapatan sektor pariwisata.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengetahui apakah pendapatan dari Sektor Pariwisata sudah efektif.
3. Mengetahui apakah pendapatan dari Sektor Pariwisata sudah efisien.
4. Mengetahui bagaimana hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dengan PAD.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik, terutama mengenai kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Klaten dan

sejauh mana ilmu yang didapatkan di Universitas dapat diterapkan di masyarakat.

2. Manfaat bagi Universitas

Diharapkan dari penelitian ini dapat disusun sebuah skripsi yang baik sehingga nantinya dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang sektor publik, yaitu mengenai kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Klaten.

3. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dengan adanya penelitian ini diharap dapat memberi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari pemerintah daerah.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang sejarah singkat, kondisi fisik, pariwisata, pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan pemerintahan.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis dan pembahasannya.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari analisa data, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran-saran yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten

Bab II

Landasan Teori

A. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Davey (1998 : 39-40) Pajak Daerah dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerahnya sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak yang ditetapkan dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi-hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Daerah Otonom), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah kabupaten/ Kota. (Mardiasmo, 2000:93)

2. Prinsip-prinsip Perpajakan Daerah

Apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah.

Prinsip-prinsip perpajakan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut (Sidik, 2000):

- a. Prinsip yang memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi Wajib Pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian, pada dasarnya setiap pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan

yang berlebihan, sehingga akan menimbulkan kerugian masyarakat secara menyeluruh.

3. Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu : (Mardiasmo, 2000:93)

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota), terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan jalan
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada obyek pajak yang belum dikenakan oleh Negara (pusat). Di samping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki obyek pajak yang lebih tinggi tingkatnya. Tarif Pajak

Daerah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing daerah.

4. Ciri-ciri Perpajakan Daerah

- a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibanding ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil
- c. Dasar pengenaan pajak merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan membayar.
- d. Balas jasa tidak dapat dinikmati secara langsung.

B. Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Secara garis besar kebijakan akuntansi ini meliputi beberapa hal, sebagai berikut (Bastian, 2002:47):

- a. Pengukuran atau *measurment*, adalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi.
- b. Penilaian atau *valuation*, adalah penentuan jumlah rupiah yang harus ditetapkan untuk setiap pos laporan pada tanggal laporan.
- c. Definisi adalah pengertian istilah atau nama-nama rekening yang digunakan dalam laporan keuangan.

- d. Pengakuan atau *recognition*, berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak dengan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui.
 - e. Pengungkapan/ penyajian atau *disclosure/ presentation* yaitu berhubungan dengan bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Keuangan Daerah (Bastian, 2002: 48-54)
- a. Kebijakan Umum Laporan Keuangan Daerah
 - 1) Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan.
 - 2) Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai.
 - 3) Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran, laporan arus kas, laporan surplus-defisit, laporan perubahan modal ekuitas dan neraca.
 - 4) Asumsi dasar atas transaksi adalah transaksi diakui atas dasar akrual.
 - 5) Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran
 - b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
 - 1) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunaannya.

- 2) Relevan, artinya penyajian informasi keuangan harus sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.
- 3) Andal, artinya informasi keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan yang materiil dan dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur.
- 4) Dapat diperbandingkan, artinya informasi keuangan suatu daerah harus dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan periode sebelumnya dalam daerah yang sama dan dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan daerah lain dalam periode yang sama.

c. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan

1) Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atas penurunan utang/kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu

- 2) Terdapat dua kriteria pengakuan pendapatan secara umum yaitu:
 - a) Pendapatan Baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi.
 - b) Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun/ terbentuk.
- 3) Pemerintah daerah mempunyai pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Daerah yaitu meliputi :

- a) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - b) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak hotel dan Restoran.
 - c) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Reklame.
 - d) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Hiburan.
 - e) Pengakuan dan pengukuran Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pengukuran dan pengakuan pendapatan lain-lain yang sah.
 - g) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Retribusi Daerah
 - h) Pengukuran dan pengukuran bagian laba BUMN.
- d. Kebijakan Akuntansi untuk Belanja/ Biaya

1) Definisi Belanja/ Biaya

Belanja/ Biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu.

2) Pengakuan dan pengukuran Belanja/ Biaya

Belanja/ Biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan apabila pengukurannya dapat diuji serta bebas dari bias.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara eksplisit dalam penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menyatakan sebagai berikut (Penjelasan Undang-undang No. 5, 1974:102): “ Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepala daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

PAD adalah penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan (Devas, 2001: 31).

PAD (Widjaja, 2001: 42) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai salah satu sumber PAD harus dominan dan mampu memikul beban biaya yang diperlukan daerah.

PAD terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Usaha Perusahaan Daerah
4. Lain-lain Usaha Daerah yang sah

Karena PAD harus dominan dan mengingat titik berat otonomi daerah adalah di Kabupaten/ Kota maka Kabupaten/ Kota dituntut untuk lebih menggali dan lebih meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dan kreativitas dari Pemerintah kabupaten untuk mengupayakan peningkatan PAD. Semakin besar sumbangan PAD kepada APBD berarti semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah atasannya. Peningkatan dan pengembangan sumber atau potensi PAD akan sangat mendukung otonomi suatu daerah jika penarikan PAD memenuhi kriteria hasil, keadilan, efisiensi, efektivitas dan kecocokan obyek sebagai sumber PAD. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu secara seksama guna menentukan sumber yang potensial sehingga biaya pengumpulannya dapat ditekan seminimal mungkin.

D. Pariwisata

1. Pengertian

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata itu mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4)

Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 yang menjadi sasaran perjalanan wisata yaitu meliputi :

- a. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka.
- b. Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan.
- c. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah dan lain-lain.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisata, Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sedangkan Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

2. Usaha-usaha yang Terkait di Bidang Pariwisata

- a. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti : Kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah (candi, makam), museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat, dan yang bersifat alamiah : keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai dan sebagainya.
- c. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata, yakni :
 - 1). Usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata);
 - 2). Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari : akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata dan sebagainya;
 - 3). Usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata.

E. Pendapatan Sektor Pariwisata

Pendapatan Sektor Pariwisata terdiri dari : Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002) dan Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisata (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002).

- 1. Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002)
 - a. Obyek dan Daya tarik Wisata terdiri dari :
 - 1) Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya dan Sejarah
 - 2) Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam/ Rekreasi

3) Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

b. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

1) Dengan melaksanakan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perda Kab. Klaten No. 20 Tahun 2002, Pemerintah memungut retribusi dengan nama Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

2) Obyek Retribusi adalah pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan kendaraan yang dipergunakannya untuk memasuki lokasi Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikuasai pengusahaannya oleh Pemerintah.

c. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan dan atau pengusahaan obyek dan daya tarik wisata.

1) Besarnya tarif retribusi untuk setiap orang ditetapkan sebagai berikut :

a) Obyek dan daya tarik wisata Budaya dan Sejarah

(1) obyek wisata budaya dan sejarah kelas I (satu) sebesar Rp 1.500,- (Seribu lima ratus) rupiah.

(2) obyek wisata budaya dan sejarah kelas II (dua) sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh) rupiah.

(3) obyek wisata budaya dan sejarah kelas III (tiga) sebesar Rp 500,- (lima ratus) rupiah.

b) Obyek dan daya tarik wisata Alam/ Rekreasi

(1) obyek wisata alam/ rekreasi kelas I (satu) sebesar Rp 1.000,- (seribu) rupiah.

(2) obyek wisata alam/ rekreasi kelas II (dua) sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh) rupiah.

(3) obyek wisata alam/ rekreasi kelas III (tiga) sebesar Rp 500,- (lima ratus) rupiah.

c) Obyek dan daya tarik wisata minat khusus

(1) obyek wisata minat khusus kelas I (satu) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

(2) obyek wisata minat khusus kelas II (dua) sebesar Rp. 1.000,- rupiah.

(3) obyek wisata minat khusus kelas III (Tiga) sebesar Rp 500 (lima ratus) rupiah.

2) Besarnya tarif retribusi kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

a) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 500,- (lima ratus) rupiah.

b) Sepeda sebesar Rp 200,- (dua ratus) rupiah.

c) Kendaraan tidak bermotor selain Sepeda yang terdiri dari Dokar/ Andong/ Bendi dan gerobak sebesar Rp 300 (tiga ratus) rupiah.

- d) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah.
 - e) Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.
- 3) Retribusi tidak termasuk biaya pentas hiburan pada event khusus dan fasilitas lainnya di obyek wisata.
- 4) Besarnya tarif retribusi pada event khusus dan fasilitas lainnya ditetapkan :
- a) Untuk event khusus :
 - Kelas I sebesar Rp 5.000 (lima ribu) rupiah
 - Kelas II sebesar Rp 4.000 (empat ribu) rupiah
 - Kelas III sebesar Rp 3.000 (tiga ribu) rupiah
 - Kelas IV sebesar Rp 2.000 (dua ribu) rupiah
 - Kelas V sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah
 - b) Untuk fasilitas lainnya :
 - Kelas I sebesar Rp 4.000 (empat ribu) rupiah
 - Kelas II sebesar Rp 3.500 (tiga ribu lima ratus) rupiah
 - Kelas III sebesar Rp 3.000 (tiga ribu) rupiah
 - Kelas IV sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah
 - Kelas V sebesar Rp 2.000 (dua ribu) rupiah
 - Kelas VI sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus) rupiah
 - KelasVII sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah
 - Kelas VIII sebesar Rp 500 (lima ratus) rupiah

Kelas IX sebesar Rp 300 (tiga ratus) rupiah

Kelas V sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah

Pengertian-pengertian lain yang tercakup dalam Obyek dan Daya Tarik Wisata antara lain (Perda Kab. Klaten No 20 Tahun 2002 tentang Obyek dan Daya Tarik Wisata Bab I Pasal I) :

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadikan sasaran wisata.
 - b. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata baik untuk bersenang-senang maupun untuk memperluas pengetahuan.
 - c. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
 - d. Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.
 - e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
2. Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisata (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002)
- a. Usaha Jasa Pariwisata, terdiri dari :

- 1) Jasa Biro Perjalanan Wisata
 - 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata
 - 3) Jasa Pramuwisata
 - 4) Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran
 - 5) Jasa Impresarial
 - 6) Jasa Kosultan Pariwisata
 - 7) Jasa Informasi Pariwisata
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
- 1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
 - a) Pemandangan alam atau buatan
 - b) Danau, waduk dan sungai
 - c) Goa-goa
 - d) Taman-taman
 - e) Hutani
 - f) Kebun binatang dan atau kebun raya
 - 2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya
 - a) Peninggalan sejarah dan purbakala
 - b) Art Galeri
 - 3) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat khusus
 - 4) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, terdiri dari :
 - a) Bar
 - b) Cafe
 - c) Pub

- d) Bioskop
 - e) Rumah billiard (bola sodok)
 - f) Panti pijat
 - g) Permainan hiburan
 - h) Play station
 - i) Dunia fantasi
 - j) Taman satwa dan pentas satwa
 - k) Pentas satwa
 - l) Gelanggang renang
 - m) Kolam memancing
 - n) Balai pertemuan umum besar
 - o) Balai pertemuan umum kecil
 - p) Barbershop
 - q) Salon rias
 - r) Taman rekreasi
 - s) Hiburan keliling/ Pasar malam
 - t) Pentas musik
 - u) Olah raga komersial besar
 - v) Olah raga komersial kecil
- c. Usaha Sarana Wisata, terdiri dari :
- 1) Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
 - a) Usaha hotel
 - b) Usaha pondok wisata

- c) Usaha bumi perkemahan
- 2) Penyediaan Makan dan Minum
 - a) Restoran dan atau Bar
 - b) Jasa Boga
- 3) Penyediaan Angkutan Wisata
- 4) Penyediaan Sarana Wisata Tirta
- 5) Penyelenggaraan Kawasan Pariwisata
- d. Daftar Tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan

Tabel 2.1
Daftar Tarif Retribusi
Izin Penyelenggaraan di Bidang Pariwisata

No.	Jenis Usaha	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
I.	Usaha Jasa Pariwisata		
	1. Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp 250.000,-	Per izin
	2. Jasa Agen Perjalanan Wisata		
	3. Jasa Pramuwisata		
	4. Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan pameran	Rp 200.000,- Rp 50.000,-	Per izin Per izin
	5. Jasa Impesariat	Rp 100.000,-	Per izin
	6. Jasa Konsultan Pariwisata		
	7. Jasa Informasi Pariwisata	Rp 100.000,-	Per izin
II.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata	Rp 100.000,-	Per izin
	1. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Alam	Rp 100.000,-	Per izin
	a. Pemandangan Alam dan atau Buatan		
	b. Danau, Waduk dan Sungai		
	c. Goa-goa		
	d. Taman-taman		
	e. Hutani	Rp 250.000,-	Per izin
	f. Kebun Binatang dan atau Kebun Raya	Rp 250.000,- Rp 200.000,- Rp 250.000,-	Per izin Per izin Per izin

No	Jenis Usaha	Rp	250.000,-	Per izin
	2. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Budaya	Rp	250.000,-	Per izin
	a. Peninggalan Sejarah dan Purbakala			
	b. Art Galery			
	3. Usaha Obyek Wisata Daya Tarik Wisata Minat Khusus			
	4. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Rp	125.000,-	Per izin
	a. Bar	Rp	125.000,-	Per izin
	b. Cafe	Rp	100.000,-	Per izin
	c. Pub			
	d. Bioskop			
	e. Rumah Billiard (Bola Sodok)	Rp	250.000,-	Per izin
	f. Rumah Billiard (Bola Sodok)	Rp	200.000,-	Per izin
		Rp	250.000,-	Per izin
	g. Panti Pijat	Rp	250.000,-	Per izin
	h. Panti Pijat	Rp	250.000,-	Per izin
	i. Permainan Hiburan			
	j. Permainan Hiburan	Rp	25.000,-	Per Meja/ thn
	k. Play Station			
	l. Play Station	Rp	200.000,-	Per izin
	m. Dunia Fantasi	Rp	15.000,-	Per Kamar/thn
	n. Taman Satwa dan Pentas Satwa	Rp	200.000,-	Per izin
		Rp	15.000,-	Per Unit/ thn
	o. Pentas Satwa	Rp	100.000,-	Per izin
	p. Gelanggang Renang	Rp	10.000,-	Per Unit/ thn
	q. Kolam Memancing	Rp	150.000,-	Tiap Fasilitas
	r. Balai Pertemuan Umum Besar	Rp	200.000,-	Per izin
	s. Balai Pertemuan Umum Kecil	Rp	10.000,-	Per Hari
		Rp	100.000,-	Per izin
	t. Barbershop	Rp	100.000,-	Per izin
	u. Salon Rias	Rp	250.000,-	Per izin
	v. Taman Rekreasi			
	w. Hiburan Keliling/ Pasar Malam	Rp	50.000,-	Per izin
	x. Hiburan Keliling/ Pasar Malam	Rp	100.000,-	Per izin
		Rp	100.000,-	Per izin
	y. Pentas Musik	Rp	150.000,-	Per izin
	z. Pentas Satwa	Rp	200.000,-	Per izin
	aa. Olah Raga komersial Besar			Per Unit/
	bb. Olah Raga Komersial Kecil	Rp	5.000,-	Malam

No	Jenis Usaha		
III.	Usaha Sarana Pariwisata	Rp 75.000,-	Per Kegiatan
	1. Penyediaan Akomodasi	Rp 10.000,-	Per Hari
	a. Hotel		
	- Hotel Bintang II	Rp 75.000,-	Per Kegiatan
	- Hotel Bintang II		
	- Hotel Bintang I	Rp 50.000,-	Per Kegiatan
	- Hotel Bintang I	Retribusi	Keterangan
	- Hotel Melati III		
	- Hotel Melati III		
	- Hotel Melati II		
	- Hotel Melati II		
	- Hotel Melati I	Rp 300.000,-	Per izin
	- Hotel Melati I	Rp 30.000,-	Per Kamar/thn
	b. Usaha Pondok Wisata	Rp 250.000,-	Per izin
	- Pondok Wisata Lingkaran	Rp 25.000,-	Per Kamar/thn
	Biru	Rp 200.000,-	Per izin
	- Pondok Wisata Lingkaran	Rp 20.000,-	Per Kamar/thn
	Kuning	Rp 150.000,-	Per izin
	- Pondok Wisata Lingkaran	Rp 15.000,-	Per Kamar/thn
	Merah	Rp 100.000,-	Per izin
c. Usaha Bumi Perkemahan	Rp 10.000,-	Per Kamar/thn	
- Perkemahan Kelas Ideal			
- Perkemahan Kelas	Rp 200.000,-	Per izin	
Lengkap			
- Perkemahan Kelas	Rp 150.000,-	Per izin	
Sedang			
-Perkemahan Kelas	Rp 100.000,-	Per izin	
Sederhana			
2. Usaha Penyediaan Makan dan Minum	Rp 200.000,-	Per izin	
a. Restoran/ Rumah Makan	Rp 150.000,-	Per izin	
- Piring Emas			
- Piring Perak	Rp 100.000,-	Per izin	
- Piring Perunggu	Rp 100.000,-	Per izin	
b. Jasa Boga			
- Kelas A			
- Kelas B			
- Kelas C			
3. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata	Rp 250.000,-	Per izin	
	Rp 200.000,-	Per izin	
4. Usaha Sarana Wisata Tirta	Rp 150.000,-	Per izin	
	Rp 200.000,-	Per izin	
	Rp 150.000,-	Per izin	
	Rp 100.000,-	Per izin	

		Rp 250.000,-	Per izin
		Rp 200.000,-	Per izin

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten

Pengertian-pengertian lain yang tercakup dalam Obyek dan Daya Tarik Wisata antara lain(Perda Kab. Klaten No. 19 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisata Bab I Pasal I) :

- a. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait bidang tersebut.
- b. Izin penyelenggaraan Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menjalankan usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
- c. Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan Kepariwisata yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

F. Efektivitas, Efisiensi, dan Korelasi

1. Efektivitas(hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil Pendapatan Sektor Pariwisata dan potensi Pendapatan Sektor Pariwisata.

Rumus untuk menghitung Efektifitas (Mahmudi, 2007:129) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Pendapatan Pariwisata, maka dari rumus diatas disesuaikan menjadi:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Pariwisata}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektif tidaknya pendapatan sektor pariwisata digunakan asumsi sebagai berikut (Anthony-Dearden-Bedford,1993:10):

- a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan sektor pariwisata) semakin besar (>100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target pendapatan sektor pariwisata) maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata semakin efektif.
- b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan sektor pariwisata) semakin kecil (<100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target pendapatan sektor pariwisata)

maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata kurang efektif.

2. Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata

Efisiensi (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil Pendapatan sektor pariwisata yang digunakan untuk menutup biaya sektor pariwisata. .

Rumus untuk menghitung Efisiensi Pajak Daerah adalah sebagai berikut: (Mahmudi, 2007:130)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Pendapatan Pariwisata, maka dari rumus diatas disesuaikan menjadi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Sektor Pariwisata}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata}} \times 100\%$$

Dalam mengukur efisiensi kinerja pemerintah, ada beberapa acuan untuk menyatakan kinerja pemerintahan efisien atau tidak, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 1998

Untuk mengukur efisien tidaknya penerimaan pendapatan sektor pariwisata digunakan tolok ukur efisiensi dengan membandingkan angka rasio yang diperoleh dengan standar rasio pendapatan sektor pariwisata kabupaten sebesar 5 % dari realisasi.

Cara pengukurannya :

- 1) Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar ratio sebesar 5% dari realisasi, maka dapat dikatakan efisien.
 - 2) Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 5 % dari realisasi, maka dapat dikatakan kurang efisien.
- b. Menurut Mahmudi (2007:130), “Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

Kedua acuan diatas kurang sesuai dengan topik yang diteliti penulis, karena keduanya digunakan untuk menentukan efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah sedangkan dalam penelitian ini yang diukur adalah efisiensi Pariwisata. Dengan demikian maka dalam penelitian ini yang dilihat adalah kecenderungan efisiensi apakah semakin naik, semakin turun, atau relatif sama. Dengan kata lain semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pariwisata semakin baik.

3. Korelasi antara Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Koefisien korelasi dalam analisis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk menguji, peneliti menggunakan rumus Korelasi *Product Moment*. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data

kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama.

Untuk menghitung koefisien korelasi digunakan program *SPSS 12.0 for windows*. Arti Angka Korelasi, ada dua hal penafsiran dalam korelasi:

- a. Berkenaan dengan besaran angka. Angka korelasi berkisar pada 0 (tidak ada korelasi sama sekali) dan 1 (korelasi sempurna).
- b. Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil. Tanda – (negatif) pada output menunjukkan arah yang berlawanan, sedangkan tanda + (positif) menunjukkan arah yang sama.

Bagian kedua dari tabel di atas menjelaskan apakah hasil uji korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel.

Hipotesis :

H_0 : Tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah

H_a : Terdapat hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah.

Dasar pengambilan keputusan :

- a. Berdasarkan Probabilitas
 - 1) Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima,
 - 2) Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

b. Berdasarkan tanda * yang diberikan SPSS

Signifikan tidaknya korelasi dua variabel bisa dilihat dari adanya tanda * pada pasangan data yang dikorelasikan.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan apakah besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut (Sugiyono, 2002:212).

Tabel 2.2
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2002:212

G. Review Penelitian Sebelumnya

- a. Suharwoko (2001) membuat skripsi dengan judul “ Perkembangan Pariwisata dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang (1984/1985-1999/2000)”. Cara penelitian untuk mengetahui perkembangan pariwisata dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan alat analisis korelasi *Karl Pearson* untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua variabel serta mengukur kekuatan hubungan antar variabel,

analisis SWOT digunakan untuk mengetahui Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (Ancaman) dari pariwisata di Kabupaten Lumajang dan pengujian statistic yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap retribusi objek wisata, pajak hotel dan restoran, dan juga pengaruh jumlah pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasilnya adalah terjadi perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 7,13 % per tahun, jumlah tamu yang menginap meningkat sebesar 3,90 % per tahun, jumlah tamu yang makan meningkat sebesar 3,96 % per tahun, perkembangan pendapatan sektor pariwisata yaitu dari retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran mengalami perkembangan rata-rata sebesar 24,47 %, atau dengan kata lain jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi obyek wisata yang dibuktikan dengan uji korelasi dengan hasil kenaikan jumlah wisatawan akan menaikkan retribusi obyek wisata dengan koefisien korelasi 0,947 mendekati 1 berpengaruh kuat.

- b. Fadliyanti (2001) membuat skripsi dengan judul “ Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat”. Cara penelitian ini menggunakan alat analisis Potensi untuk mengetahui potensi pajak hotel dan restoran sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat, analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis

elastisitas, dan analisis regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil. Hasil penelitian, dengan pengembangan pariwisata maka jumlah arus kunjungan wisatawan meningkat (berpengaruh terhadap pajak hotel dan restoran dengan peningkatan sebesar 44,27 %), rasionya cukup efektif, dan tingkat efisiensi rata-rata 6,61 %.

- c. Kurniawan (2007) membuat skripsi dengan mengambil judul “ Analisis Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Sleman Dilihat dari Sektor Pajak dan Retribusi”. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui kontribusi, laju pertumbuhan, efisiensi dan efektivitas dari pajak hotel dan restoran beserta retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Sleman. Adapun hasilnya adalah, rata-rata kontribusi pajak hotel 19,7 %, pajak restoran 4,6 % dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 1,94 %. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 dengan pajak hotel sebesar 68,56 %, pajak restoran sebesar 68,56 % dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 35,7 %. Dengan tingkat efisiensi 14,795 %, pengembangan pariwisata kabupaten Sleman dapat dikategorikan Efisien sesuai yang dikemukakan Mahmudi (2007:130), bahwa dapat dikatakan Efisien jika tingkat efisiensi kurang dari 100 %.

Penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan topik namun dalam pengolahan data atau analisis data dari penelitian sebelumnya berbeda. Studi kasus dan fokus penelitian juga berbeda. Salah satu perbedaannya, adalah penerimaan Pendapatan Pariwisata yang dalam

penelitian sebelumnya memasukan Pajak Hotel dan restoran ke dalam pendapatan pariwisata. Dalam penelitian ini salah satu acuan penulis adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002, dimana pendapatan pariwisata diperoleh dari Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataaan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui kontribusi, efektivitas dan efisiensi serta korelasi Pendapatan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, berupa studi kasus pada instansi pemerintah yaitu penelitian terhadap data tentang pendapatan sektor Pariwisata yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Klaten dan penelitian mengenai kontribusi terhadap PAD untuk periode tahun 2003 sampai dengan periode tahun 2007 . Data yang digunakan adalah data sekunder.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan dan kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
2. Waktu Penelitian dilaksanakan dalam waktu dua bulan yaitu selama bulan Oktober sampai dengan November tahun 2008.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

D. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Pendapatan sektor Pariwisata dan PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung kepada para subyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam masalah ini, wawancara dilakukan dengan Pimpinan atau pejabat-pejabat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten, Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini antara lain sumber penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Klaten, data kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Klaten dan PAD Kabupaten Klaten dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan lain-lain. Dokumen yang sah dapat dijadikan bukti bahwa penelitian yang dilakukan adalah benar.

F. Data yang Diperlukan

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Klaten
2. Data-data penerimaan PAD
3. Data-data penerimaan pendapatan Sektor Pariwisata
4. Data-data penerimaan Pajak Daerah

G. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dilakukan analisis untuk mengetahui berapa besar Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pendapatan Sektor pariwisata} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Tabel untuk Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor
Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tahun Anggaran (a)	Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata (b)	Pendapatan Asli Daerah (c)	Kontribusi (%) (b/c)

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan pariwisata}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektif tidaknya Pendapatan Sektor Pariwisata digunakan kriteria sebagai berikut: (Anthony-Dearden-Bedford,1993:10)

- c. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata) semakin besar (>100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Sektor Pariwisata) maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata semakin efektif.
- d. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata) semakin kecil (<100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Sektor Pariwisata) maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata semakin tidak efektif.

Apabila tingkat efektivitasnya mengalami perubahan yang tidak menentu pada tiap-tiap tahun anggaran, maka untuk melihat perkembangan efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata digunakan analisis *Least Square* dengan rumus sebagai berikut (Budiyuwono, 1995:211-212).

$$Y' = a + bx$$

Dimana :

Y' = trend efektivitas Pendapatan sektor Pariwisata

a = konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai Y apabila $x = 0$

b = variabilitas permintaan x yaitu besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan suatu unit x

x = tahun

Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan efektivitas selama 5 tahun Anggaran yang telah diteliti.

3. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Sektor Pariwisata}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata}} \times 100\%$$

Karena dalam penelitian ini yang dilihat adalah kecenderungan efisiensi apakah semakin naik, semakin turun, atau relatif sama maka semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan kinerja pariwisata semakin baik.

4. Untuk menjawab rumusan masalah keempat dilakukan analisis *Product Moment*

Untuk menghitung koefisien korelasi digunakan program **SPSS 12.0 for windows**. Arti Angka Korelasi, ada dua hal penafsiran dalam korelasi:

- a. Berkenaan dengan besaran angka. Angka korelasi berkisar pada 0 (tidak ada korelasi sama sekali) dan 1 (korelasi sempurna).
- b. Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil. Tanda – (negatif) pada output menunjukkan arah yang berlawanan, sedangkan tanda + (positif) menunjukkan arah yang sama.

Bagian kedua dari tabel di atas menjelaskan apakah hasil uji korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel.

Hipotesis :

Ho : Tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah

Ha : Terdapat hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah.

Dasar pengambilan keputusan :

a Berdasarkan Probabilitas

1) Jika Probabilitas $> 0,05$, maka Ho diterima,

2) Jika Probabilitas $< 0,05$, maka Ho ditolak.

b Berdasarkan tanda * yang diberikan SPSS

Signifikan tidaknya korelasi dua variabel bisa dilihat dari adanya tanda * pada pasangan data yang dikorelasikan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Klaten

Pemerintah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950. Pelantikan anggota DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) dilakukan pada 28 Oktober 1950 oleh Residen Surakarta mewakili Gubernur Jawa Tengah. Sedang Pemilihan anggota DPRDS tersebut berlangsung pada tanggal 28 September 1950, sebulan menjelang pelantikan. Berdasarkan tanggal pelantikan anggota DPRDS tersebut maka tanggal 28 Oktober 1950 dijadikan tanggal Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Klaten.

B. Kondisi Fisik

1. Letak dan Luas Wilayah

Letak suatu daerah di permukaan bumi dapat dilihat dari beberapa tinjauan, seperti; letak administrasi, astronomis, dan ekonomis. Letak administrasi adalah letak suatu tempat bila dikaitkan dengan wilayah administrasi lain di sekitarnya; letak astronomis adalah letak suatu tempat dikaitkan dengan koordinat titik di permukaan bumi yang dinyatakan dengan lintang dan bujur; sedangkan letak ekonomis adalah posisi suatu

tempat yang dapat berinteraksi dengan tempat lain sehingga dapat memberikan nilai lebih secara ekonomis daerah yang bersangkutan.

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 65.556 Ha dan secara administratif terbagi menjadi 26 kecamatan meliputi 391 desa dan 10 kelurahan. Secara astronomis terletak di antara $07^{\circ} 32' 23''$ LS – $07^{\circ} 48' 30''$ LS dan $110^{\circ} 26' 46''$ BT – $110^{\circ} 48' 00''$ BT dengan ketinggian wilayah antara 100 - 400 m di atas permukaan air laut (dapl). Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Secara administratif memiliki batas sebagai berikut; sebelah selatan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Letak Kabupaten Klaten sangat strategis karena berada di antara dua kota besar yang mempunyai pengaruh kuat terhadap Kabupaten Klaten yaitu Yogyakarta (30 km) dan Surakarta atau Solo (36 km) yang memungkinkan berinteraksi dengan kedua kota tersebut. Kedua kota tersebut memiliki daya tarik karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya dan pendidikan. Posisi seperti ini menjadikan Klaten cepat berkembang, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya fasilitas seperti Bandara Internasional Adisumarmo di Solo, tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan kedua kota tersebut dan keberadaan Bandara Adi

Sucipto dan status Yogyakarta sebagai kota Pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.

2. Topografi

Topografi adalah gambaran konfigurasi permukaan bumi yang terbentuk oleh tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen bersifat membangun seperti: Aktivitas vulkanik, tektonik (lipatan atau patahan) dan tenaga eksogen yang bersifat merusak seperti: erosi, longsor, dan abrasi.

Topografi wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi daerah datar, bergelombang, curam, dan sangat curam sebagaimana dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Klaten

No.	Topografi	Kemiringan (%)	Luas (Ha)
1.	Datar	0 - 2	48.325
2.	Bergelombang	2 - 15	14.508
3.	Curam	15 - 40	1.488
4.	Sangat Curam	> 40	1.235
Jumlah			65.556

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten Tahun 2006

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu :

- a. Wilayah dengan ketinggian <100m di atas permukaan air laut (dapl), meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas.
- b. Wilayah dengan ketinggian 100-200m dapl, meliputi : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan,

Karanganom (bagian timur), Polanharjo (bagian timur), Delanggu, Juwiring (bagian barat), dan Wonosari (bagian barat).

- c. Wilayah dengan ketinggian 200-400 m dapl, meliputi kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (bagian Utara), Karangnongko, Kebonarum (bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karangnom (bagian barat), Tulung, dan Polanharjo (bagian barat).
- d. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000 m dapl, meliputi kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi topografi tersebut di samping dapat memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), juga dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi. Keadaan topografi semacam ini juga mendatangkan keuntungan dalam mengembangkan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumberdaya air untuk irigasi, maupun kebutuhan air minum, bahkan masyarakat Kota Solo mendapat pasokan air minum dari sumber mata air di Kabupaten Klaten.

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan adalah semua bentuk penggunaan dan pemanfaatan tiap bidang lahan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Bentuk penggunaan lahan merupakan interaksi antara aktivitas manusia dengan sumberdaya lahannya.

Tindakan manusia yang diterapkan pada sebidang lahan tertentu menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Adapun pembagian penggunaan lahan di Kabupaten Klaten sebagaimana terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten
Tahun 2005-2008

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Ha)			
		2005	2006	2007	2008
1.	Wilayah Hutan	1.450	1.450	1.450	1.450
2.	Lahan Persawahan				
	a. Sawah Teririgasi	32.014	32.253	32.595	32.593
	b. Sawah Tadah Hujan	1.480	1.214	1.112	1.112
3.	Lahan Kering				
	a. Rawa-rawa & Kolam	201	201	202	202
	b. Ladang	6.312	6.312	6.287	6.287
	c. Permukiman	19.920	19.938	19.995	19.725
	d. Lain-lain	4.179	4.188	4.187	4.187
	Jumlah	65.556	65.556	65.556	65.556

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, Tahun 2008.
Data Tahun 2008 adalah data semester 1

Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 sebagai berikut: luas hutan sebesar 1.450 ha (2,21%), sawah irigasi sebesar 32.014 ha (48,83%), sawah tadah hujan sebesar 1.480 ha (2,26%), rawa-rawa sebesar 201 ha (0,31%), ladang sebesar 6.312 ha (9,63%), permukiman sebesar 19.920 ha (30,39%), dan lahan yang belum diusahakan sebesar 4.179 ha (6,37%). Pada tahun 2006 sawah teririgasi mengalami kenaikan karena pengaruh musim hujan yang relatif panjang dari tahun biasanya.

Adapun pada tahun 2007 dan semester I tahun 2008 yang mengalami perluasan lahan adalah : lahan sawah teririgasi mengalami perluasan sebesar 342 ha, rawa dan kolam sebesar 1 ha dan pemukiman sebesar 57

ha, sedangkan yang mengalami penyusutan seperti usaha lain sebesar 1 ha, sawah tadah hujan sebesar 102 ha, ladang sebesar 25 ha dan lahan yang belum diusahakan sebesar 1 ha.

Besarnya luas dan presentase lahan sawah teririgasi menunjukkan bahwa tanah pertanian di Klaten subur, dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wilayah agropolitan yaitu suatu kawasan yang berbasis ekonomi masyarakatnya adalah sektor pertanian yang berkelanjutan, karena selama ini Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Jawa Tengah dan salah satu produk pertanian yang terkenal dengan padi Delanggu yang memiliki keistimewaan rasa, bentuk serta warna berasnya. Sebutan ini masih menggema sampai sekarang. Untuk mengembangkan Klaten sebagai kawasan agropolitan, maka perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dalam tata ruang daerah.

4. Iklim

Suhu/temperatur bulanan di Kabupaten Klaten rata-rata 28°C – 30°C dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 275 mm dengan kecepatan angin berkisar 20 - 25 knot. Kondisi iklim Kabupaten Klaten termasuk dalam wilayah beriklim tropis, artinya iklim yang memiliki sifat iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun.

Iklim menjadi sangat penting bagi kehidupan baik untuk pertanian maupun perkebunan seperti tembakau *vorstenland* yang terkenal di Klaten.

Oleh karenanya informasi cuaca mulai dari curah hujan, suhu, kelembaban dan kecepatan angin sangat diperlukan oleh pengguna lahan pertanian dalam upaya untuk meningkatkan produksi maupun dalam upaya mengurangi dampak dari melesetnya perkiraan cuaca.

C. Pariwisata

1. Kepariwisataan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai letak strategis yaitu antara Kota Yogyakarta dan Surakarta. Berdasarkan Profil daerah Kabupaten Klaten dalam buku, “Mengenal Kepariwisataan Kabupaten Klaten” (2004:XV) terlihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial sehingga merupakan penyangga pangan untuk beras di Jawa Tengah dan juga penghasil batu kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Dengan melihat karakteristik serta potensi yang ada di Kabupaten Klaten maka dapat dilihat bahwa Klaten mempunyai potensi pariwisata yang bisa dikembangkan lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana hal tersebut telah diamanatkan dalam penjelasan umum point (b) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah termasuk di dalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengelola Pariwisata di Kabupaten Klaten

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Klaten berada di bawah wewenang Kantor Pariwisata yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi organisasi Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 285 Tahun 2001. Guna menjalankan tugas telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten.

Sebagai organisasi pelaksana dalam bidang kepariwisataan, maka Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Klaten, yaitu antara lain:

- a. Peningkatan pengelolaan administrasi Kantor Pariwisata
- b. Perencanaan dan pengembangan pariwisata
- c. Peningkatan produk dan promosi pariwisata
- d. Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan
- e. Pelayanan pembinaan dan pengawasan usaha di bidang pariwisata
(Renstra Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010).

Sebagaimana umumnya sebuah organisasi, Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. **VISI :**

“ Terwujudnya Kepariwisataaan Klaten yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, dan berbasis pada masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan pendapatan daerah.“

b. **MISI :**

- 1) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Kepariwisataaan yang ada menjadi sumber daya ekonomi yang lestari dan mampu menopang ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha pariwisata, pertumbuhan wilayah dan pendapatan daerah.
- 2) Meningkatkan profesionalisme kegiatan kepariwisataan melalui perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang ketat dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas potensi kepariwisataan yang ada melalui pengembangan sarana dan prasarana serta produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada kebudayaan dan pesona alam yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata.
- 4) Mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata melalui peningkatan koordinasi dan dukungan kebijaksanaan lintas sektoral dan lintas daerah.

3. Objek dan Daya Tarik Wisata

Klaten merupakan daerah yang memiliki potensi Objek dan Daya Tarik Wisata yang banyak mulai dari wisata alam, wisata budaya, tempat bersejarah, upacara tradisional serta didukung oleh sarana dan prasarana wisata (Mengenal Kepariwisataan Kabupaten Klaten, 2004:01). Dalam pembahasan ini akan dikelompokkan menjadi wisata alam dan wisata budaya di mana tempat bersejarah dan upacara tradisional dimasukkan ke dalam penjelasan wisata alam atau wisata budaya, karena keduanya memiliki kesamaan tempat (obyek wisata).

Adapun wisata alam yang ada di Kabupaten Klaten (Mengenal Kepariwisataan Kabupaten Klaten, 2004:01-22) yaitu sebagai berikut :

a. Deles Indah

Obyek wisata terletak di lereng Gunung Merapi sebelah timur, dan berada di wilayah Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, dengan ketinggian antara 800 – 1.300 m di atas permukaan laut. Deles mempunyai potensi spesifik suasana pemandangan alam pegunungan. Di sekitar Deles Indah ini dikenal pula beberapa peninggalan sejarah dan juga tempat rekreasi khusus antara lain : Bekas pesanggrahan Sunan Paku Buwono X, Makam Kyai Mloyopati, Sendang Kali Reno, Taman Rekreasi Ngajaran, Taman Pemandangan Pring Cendani, serta Gua Sapuangin/Siluman.

b. Rowo Jombor

Rowo Jombor terletak di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat yang dilatar belakangi oleh pegunungan kapur. Deles mempunyai potensi spesifik suasana pemandangan alam serta warung makan *apung*.

Jarak : 8 km arah tenggara dari Kota Klaten

Luas kawasan : 198 ha

Panjang tanggul : 7,5 km

Lebar tanggul : 12 m

Daya tampung air : 4.000.000 m³

Di lingkungan Obyek Wisata Rowo Jombor terdapat : Rumah Minangkabau, Taman Rekreasi anak-anak di Bukit Sidoguro, Gua Kendil, Gua Payung, dan Sendang *Bulus* Jimbung.

c. Gunung Watu Prahu

Gunung ini merupakan salah satu obyek wisata yang mempunyai jarak dari Kota Klaten sekitar 15 km, terletak di Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, potensi spesifik berupa suasana alam pegunungan dan pemandangan alam.

Di samping Gunung Watu Prahu terdapat juga : Fosil kece, batu marmer, hutan jambu di Gunung Kunang seluas 14 ha, serta museum Geologi UGM Yogyakarta.

d. Gua Suran

Sebuah Gua yang terletak di Kalurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom. Gua ini digunakan sebagai tempat sujud dan semedi Kyai Ageng

Gibrig pada waktu belum bisa membuat masjid. Gua berbentuk leter L dengan kedalaman 4 m.

Di samping gua terdapat Sendang Suran sebagai tempat wudhu Kyai Ageng Gibrig. Lokasi ini sekarang dipergunakan untuk tempat penyebaran *apem* yang dilakukan setiap bulan Sapar.

Di lokasi yang sama terdapat :

- 1) Gua Belan, merupakan terowongan yang kedalamannya 8 m.
- 2) Sendang Plampeyan.
- 3) Taman Rekreasi anak-anak di Plampeyan, dengan luas 700 m² di sebelah selatan makam Kyai Ageng Gibrig.

Di lokasi ini pula terdapat upacara tradisional yang diselenggarakan setiap tahun. Tepatnya pada hari Jumat pertengahan bulan *Sapar*, yaitu *Yaqowiyu*. *Yaqowiyu* diambil dari doa Kyai Ageng gribig sebagai penutup pengajian yang berbunyi : *Ya qowiyu warsuqna wal muslimin*, yang artinya : Ya Tuhan berikanlah kekuatan kepada kita segenap kaum muslimin.

e. Sumber Air Ingas

Obyek Wisata Sumber Air Ingas memiliki luas sekitar 15.000 m² terbentang di pinggiran Kali Busur yang mengalir dari utara ke selatan, sehingga pengunjung yang akan memasuki obyek wisata ini harus meniti jembatan gantung yang justru merupakan daya tarik sendiri dari obyek-obyek wisata yang lain.

Obyek wisata ini sangat ramai apabila menjelang bulan puasa tiba, banyak pengunjung yang melakukan ritual *padusan* di obyek ini dengan kepercayaan bahwa puasanya akan dapat lancar tanpa halangan suatu apapun.

Jarak : 17 km ke arah utara Kota Klaten

Terletak : Di Desa Cokro, Kecamatan Tulung

Luas kawasan : 15.000 m²

Fungsi : Sebagai tempat rekreasi, dan air dipergunakan untuk air minum Kraton Surakarta Hadiningrat atas prakarsa Paku Buwono X.

f. Pemandian / Sendang

Kabupaten Klaten memiliki banyak mata air yang tersebar hampir di setiap daerah. Berikut adalah Pemandian/ Sendang yang ada di Kabupaten Klaten, antara lain:

1) Pemandian Lumban Tirto

Terletak di Desa Daleman, Kecamatan Tulung

Jarak dari Kota Klaten : 17 km

Luas : 25 m x 8 m

Luas kawasan : 700 m²

Kedalaman rata-rata : 1,5 m

Fungsi : sebagai kolam renang

2) Pemandian Jolotundo

Terletak di Desa Jambeyan, Kecamatan Karangnom

Jarak dari Kota Klaten	: 8 km
Luas	: 11 m x 20 m
Luas kawasan	: 500 m ²
Kedalaman rata-rata	: 2 m
Fungsi	: sebagai tempat pemandian

3) Pemandian Ponggok

Terletak di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo

Jarak dari Kota Klaten	: 10 km
Luas	: 600 m ²
Kedalaman rata-rata	: 1,5 m
Fungsi	: sebagai pemandian alam dan pengairan

4) Umbul Tirto Mulyono dan Tirto Mulyani

Terletak di Desa Pluneng, Kecamatan Kebon

Jarak dari Kota Klaten	: 6 km
Luas	: 400 m ²
Luas kawasan	: 700 m ²
Kedalaman rata-rata	: 1,5 m
Fungsi	: sebagai pemandian alam

5) Sendang Plampeyan

Terletak di Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom

Jarak dari Kota Klaten	: 12 km
Luas	: 16 m ²

Kedalaman rata-rata : 1 m
Fungsi : sebagai tempat mandi dan rekreasi

6) Sendang Gotan

Terletak di Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom

Jarak dari Kota Klaten : 5 km
Luas : 250 m²
Kedalaman rata-rata : 1,5 m
Fungsi : sebagai tempat mandi dan air minum

7) Sendang Riyo Manggolo

Terletak di Desa Kajoran Kriyan, Kecamatan Klaten Selatan

Jarak dari Kota Klaten : 5 km
Luas : 150 m²
Luas kawasan : 1000 m²
Kedalaman rata-rata : 1,5 m

8) Sendang Bulus Jimbung

Terletak di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes

Jarak dari Kota Klaten : 6 km
Luas : 72 m²
Kedalaman rata-rata : 1,5 m
Fungsi : sebagai pemandian alam dan rekreasi.

9) Sendang Maerokoco

Terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat

Jarak dari Kota Klaten : 12 km

Luas : 400 m²

Kedalaman rata-rata : 1,5 m

Fungsi : Untuk bersuci sesudah dan
sebelum ziarah.

10) Sendang Tretes

Terletak di Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari

Jarak dari Kota Klaten : 15 km

Luas : 400 m²

Kedalaman rata-rata : 2 m

11) Sendang Sinongko

Terletak di Desa Pokak, Kecamatan Ceper

Jarak dari Kota Klaten : 7 km

Luas : 400 m²

Luas kawasan : 1 ha

Kedalaman rata-rata : 1 m

Besarnya debit air : 260 lt/ detik

Sendang lanang : 45,65 lt/ detik

Sendang Wadon dan Embung: 34,15 lt/ detik

Spesifikasi: Di obyek ini banyak ditumbuhi pohon-pohon langka dan umurnya sudah puluhan bahkan ratusan tahun, antara lain:

Gayam Bathok, sudah berumur ratusan tahun dan mempunyai buah paling besar; Gayam Lumut, gayam yang batangnya paling hijau; Gayam Tumpeng, gayam yang bentuk bijinya seperti tumpeng; Gayam Kerikil, gayam yang buah atau bijinya mempunyai ukuran paling kecil; Gayam Buntung, gayam yang bentuk pohonnya paling pendek pencabangannya; Pohon Karet yang berumur ratusan tahun; dan juga Pohon Ingas.

Setiap tahun di Sendang Sinongko diadakan upacara tradisional Bersih Sendang. Bersih Sendang diadakan sesudah panen pada musim kemarau dan telah dibakukan pada bulan Agustus hari Jumat Wage atau pada bulan Juli sesudah tanggal 25 atau bulan September sebelum tanggal 5.

Masyarakat sekitar sendang, khususnya Desa Pokak merayakan ritual bersih sendang sebagai ungkapan rasa syukur atas semua berkah yang telah dilimpahkan. Rasa syukur diwujudkan dengan pesta sesaji dalam bentuk pesta sesaji dalam bentuk nasi tumpeng dan minuman dawet dengan memotong kambing sebagai persembahan. Pemotongan kambing dilakukan di bawah pohon karet yang umurnya telah ratusan tahun dan memakai alas pelataran akar pohon, sesuatu yang diluar jangkauan akal manusia dan seakan tidak wajar bahwa darah yang keluar dan mengucur di pelataran akar karet tersebut seakan hilang dan tidak berbekas.

Padahal kambing yang dipotong tidak kurang dari 100 ekor kambing dan berjenis kelamin laki-laki.

Sedangkan wisata budaya yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari candi dan makam (Mengenal Kepariwisata Kabupaten Klaten, 2004:23-43), yaitu :

a. Candi

1) Candi Sewu

Terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, jarak dari Kota Klaten 15 km ke arah barat. Candi ini terdiri dari sebuah Candi Induk yang diapit oleh Candi Perwara yang berjumlah 240 buah dan Candi Apit 8 buah.

Karena jumlah candi tersebut cukup banyak maka disebut Candi Sewu. Candi ini didirikan pada abad IX oleh salah seorang penganut agama Budha Maha Yana.

Luas Candi : 14.059,48 m²

Fungsi : Sebagai obyek wisata peninggalan bersejarah

Pengunjung rata-rata : 2.000 orang tiap bulan

2) Candi Lumbung

Terletak di Dukuh Togo, Desa Tlogo Kecamatan Prambanan. Jarak dari Kota Klaten 15 km ke arah barat. Candi Lumbung terdiri dari sebuah Candi Induk yang dikelilingi oleh 16 Candi Perwara. Candi

Induk ini menghadap ke timur, berkamar kosong dan atapnya berbentuk stupa.

Luas areal candi : 543,35 m²

Fungsi : sebagai obyek wisata peninggalan bersejarah

Pengunjung rata-rata : 2.000 orang tiap bulan

3) Candi Bubrah

Terletak di Dukuh Klurak, Desa Tolgo Kecamatan Prambanan Klaten. Candi ini terletak di sebelah utara Candi Lumbung, nama Bubrah mungkin diambil dari keadaan candinya yang sudah bubrah atau rusak. Masa pendiriannya sama dengan Candi Sewu pada abad IX, Candi Induk menghadap ke timur.

Jarak dari Kota Klaten: 14 km ke arah barat

Luas areal candi : 343,80 m²

Fungsi : sebagai obyek wisata peninggalan bersejarah

Pengunjung rata-rata : 53 orang tiap bulan

4) Candi Plaosan

Terletak di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan.

Jarak dari Kota Klaten : 14 km ke arah barat

Candi Plaosan terdiri dari dua kelompok candi, yaitu: Kelompok Candi Plaosan Kidul, kelompok candi ini telah mengalami banyak kerusakan, dan Kelompok Candi Plaosan Lor, kelompok ini terdiri

dari dua buah Candi Induk yang dikelilingi oleh 116 buah stupa Perwara dan 50 buah Candi Perwara. Candi Induk Plaosan Lor dipugar pada tahun 1962 oleh Dinas Purbakala. Di dalam kamar Candi Induk terdapat 6 buah arca Dhyani Budisatwa.

5) Candi Sojiwan

Candi ini terletak di Dukuh Sojiwan, Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan.

Jarak dari Kota Klaten : 15 km ke arah barat
 Luas Areal candi : 401,3125 m²
 Fungsi : sebagai obyek wisata peninggalan
 benda bersejarah

6) Candi Asu

Terletak di Dukuh Klurak, Desa Tlogo Kecamatan Prambanan

Jarak dari Kota Klaten : 15 km ke arah barat
 Dibuat pada abad : IX AD
 Luas areal candi : 6.000 m²
 Fungsi : Sebagai obyek wisata peninggalan
 benda bersejarah

7) Candi Merak

Terletak di Dukuh Karangnongko, Desa Karangnongko Kecamatan Karangnongko

Jarak dari Kota Klaten : 10 km ke arah barat
 Luas areal candi : 800 m²

Fungsi : Sebagai obyek wisata peninggalan
benda bersejarah

b. Makam

1) Makam Mlayopati

Terletak di Dukuh Deles, Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang

Jarak dari Kota Klaten : 25 km

Dibuat dari : Gundukan tanah dan ada batu bertuliskan Mlayopati dengan huruf Jawa baru dan juga disebut Ki Hajarmerto

Luas areal candi : 30 m²

Fungsi : Sebagai tempat ziarah

Pengunjung : 1.000 orang tiap bulan

2) Makam Kyai Ageng Gribig

Terletak di Dukuh Jatinom, Desa Jatinom Kecamatan Jatinom

Jarak dari Kota Klaten : 9 km

Luas kawasan : 70m x 40 m = 2.800 m²

Luas bangunan : 15 m x 12 m = 180 m²

Panjang makam : 2 m

Dibuat : Dari batu merah dan kayu

Fungsi : Sebagai tempat ziarah

Hari istimewa : Malam Jumat Legi dan Kliwon

Pengunjung : 5.000 orang tiap bulan

Tujuan utama : Untuk mohon berkah keselamatan

3) Makam Nyai Ageng Anjang Mas

Terletak di Dukuh Gledeg, Desa Gledeg, Kecamatan Karangnom

Jarak dari Kota Klaten : 8 km

Luas kawasan : 600 m²

Dibuat : Dari batu bata dan genting

Fungsi : Sebagai tempat ziarah

Hari istimewa : Malam Jumat

Pengunjung : 1.000 orang tiap bulan

4) Makam Kyai Ageng Syarifudin

Terletak di Dukuh Gading Santren, Desa Belangwetan, Kecamatan

Klaten Utara

Jarak dari Kota Klaten : 5 km

Luas kawasan : 1.000 m²

Luas makam : 25 m²

Fungsi : Tempat ziarah

Dibuat dari : Batu dan sirap

Pengunjung : 1.000 orang tiap bulan

5) Makam Kyai Melati

Terletak di Kampung Sekalekan, Kalurahan Kota Klaten,

Kecamatan Kota Klaten

Luas : 56 m²

Panjang makam : 1,70 m

Fungsi	: Tempat ziarah
Dibuat dari	: Batu bata tanpa atap
Hari istimewa	: Setiap malam Jumat
Pengunjung	: 2.000 orang tiap bulan

6) Makam Gusti Panembahan Romo

Terletak di Dukuh/ Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan

Jarak dari Kota Klaten	: 5 km
Luas kawasan	: 600 m ²
Luas bangunan	: 84 m ²
Panjang makam	: 2 m
Fungsi	: Tempat ziarah
Dibuat dari	: Batu merah, kayu dan batu kapur
Hari istimewa	: Malam Jumat Kliwon
Pengunjung	: 4.000 orang tiap bulan

7) Makam Gusti Panembahan Agung

Terletak di daerah Kauman, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes

Jarak dari Kota Klaten	: 5 km
Luas kawasan	: 462 m ²
Luas bangunan	: 215 m ²
Panjang makam	: 2 m
Fungsi	: Tempat ziarah
Dibuat dari	: Batu merah dan kayu
Hari istimewa	: Malam Jumat Kliwon

Pengunjung : 4.000 orang tiap bulan
 Tujuan : Untuk mendapatkan berkah/ derajat

8) Makam Kyai Ageng Pandanaran

Terletak di Dukuh Paseban, Desa Paseban Kecamatan Bayat

Jarak dari Kota Klaten : 15 km
 Luas kawasan : 1,5 ha
 Luas bangunan : 106 m²
 Panjang makam : 2,5 m
 Fungsi : Tempat ziarah
 Dibuat dari : Batu merah, kayu dan sirap
 Hari istimewa : Malam Jumat Legi
 Pengunjung : 10.000 orang tiap bulan

9) Makam Menang Lase konang

Terletak di Dukuh Konang, Desa Kebon, Kecamatan Bayat

Jarak dari Kota Klaten : 15 km
 Luas kawasan : 1 ha
 Panjang makam : 2,5 m
 Dibuat dari : Batu merah, kayu dan genting
 Hari istimewa : Malam Jumat Legi
 Pengunjung : 4.000 orang tiap bulan

10) Makam Rng. Ronggowarsito

Terletak di Dukuh Palar, Desa Palar, Kecamatan Trucuk

Jarak dari Kota Klaten : 15 km

Luas kawasan	: 15.000 m ²
Luas bangunan	: 264 m ²
Panjang makam	: 2 m
Fungsi	: Tempat ziarah
Dibuat dari	: Marmer dan genting soka
Hari istimewa	: Malam Jumat dan Selasa Kliwon
Pengunjung	: 10.000 orang tiap bulan

11) Makam Kyai Ageng Perwito

Terletak di Dukuh Ngreden, Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari

Jarak dari Kota Klaten	: 25 km
Luas kawasan	: 2.000 m ²
Luas bangunan	: 280 m ²
Panjang makam	: 2,5 m
Fungsi	: Tempat ziarah
Dibuat dari	: Batu merah, kayu dan kayu sirap
Hari istimewa	: Malam Jumat Wage
Pengunjung	: 4.000 orang tiap bulan

12) Petilasan Sembahyang Kanjeng Sunan Kalijogo

Terletak di Dukuh Sepi Desa Barepan, Kecamatan Klaten Cawas

Jarak dari Kota Klaten	: 20 km
Luas	: 15 m ²
Panjang makam	: 2 m
Dipagari	: Tembok batu merah

Fungsi	: Tempat ziarah
Petilasan	: Berupa batu putih berujud lekukan- lekukan petilasan sholat
Pengunjung	: 10.000 orang tiap bulan

4. Kunjungan Obyek Wisata Kabupaten Klaten

Banyaknya pengunjung obyek wisata di Kabupaten Klaten kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata Kabupaten Klaten
Tahun 2003-2007

Tahun	Pengunjung (orang)		Jumlah
	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	
2003	29.078	1.545.456	1.579.534
2004	31.495	1.801.878	1.833.733
2005	40.978	1.577.602	1.618.580
2006	70.577	1.061.917	1.132.494
2007	89.970	887.227	973.197

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Pengunjung obyek wisata di Kabupaten Klaten Tahun 2003 sebagai berikut: wisatawan mancanegara sebesar 29.078 orang, wisatawan nusantara 1.545.456 orang, sehingga jumlah pengunjung Tahun 2003 sebesar 1.579.534. Pada Tahun 2004 mengalami peningkatan jumlah pengunjung, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, dengan jumlah pengunjung pada tahun 2004 sebesar 1.833.733 orang. Pada tahun 2004, Kabupaten Klaten menduduki peringkat tiga dari tiga puluh lima Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah, setelah Kabupaten Magelang sebesar 2.428.565 orang dan Kabupaten Demak sebesar 1.906.901 orang .

Setelah tahun 2004, kunjungan wisatawan ke Klaten mengalami penurunan, pada tahun 2005 jumlah kunjungan wisatawan turun sebesar 215.153 orang menjadi 1.618.580 orang. Pada tahun 2006 jumlah kunjungan sebesar 1.132.494 orang, dan tahun 2007 turun lagi menjadi 937.197 orang.

D. Pendidikan

Penduduk yang bersekolah pada jenjang SD – SMA/ SMK secara umum mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2005. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah murid yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten.

Selain fasilitas tempat belajar, ketersediaan tenaga pengajar juga cukup penting, rasio murid terhadap guru berkisar antara 8 – 14. Sedangkan jumlah anak putus sekolah pada tahun 2005 sebesar 741 murid dan tahun 2006 sebesar 667 murid untuk sekolah negeri. Jumlah anak putus sekolah terbanyak ada pada tingkat non SMEA (swasta) 0,36%.

E. Kondisi Ekonomi

1. Keuangan Daerah

Perkembangan Pendapatan Daerah selama lima tahun menunjukkan arah yang positif. Pendapatan Daerah terlihat dari perkembangan yang lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, sebagaimana disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Klaten Tahun 2003-2008

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pajak Daerah	8.605.562.041	10.291.535.387	9.732.205.843	13.052.631.723	14.638.314.886	6.913.927.461
2	Retribusi Daerah	7.720.125.608	8.506.221.694	10.771.625.836	10.429.466.034	9.995.101.398	3.658.902.185
3	Bagian Jasa Usaha Daerah	1.146.406.000	1.195.358.000	3.596.768.218	2.451.270.952	2.187.788.810	860.818.657
4	Lain-lain Pendapatan	4.805.705.515	7.085.027.849	9.449.222.251	13.560.359.234	25.289.654.998	503.709.057
	Jumlah	22.277.799.164	27.078.142.930	33.549.822.148	39.493.727.943	52.110.860.092	11.937.357.360

Sumber : Dipenda Kabupaten Klaten
 Data Tahun 2008 adalah Data Semester I

Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan karena memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penggalan dari sumber ini harus mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan PAD dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Klaten.

2. Pertanian

Pertanian merupakan produk unggulan Klaten. Sejak dahulu Klaten dikenal sebagai lumbung beras, dan penghasil beras berkualitas tinggi seperti beras Rojolele dari Delanggu. Potensi agrobisnis yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten adalah tanaman jagung untuk makanan ternak, tanaman tembakau jenis *voorstenlanden*, *virginia* dan tembakau *asepen*. Tanaman tumpang sari dikembangkan oleh masyarakat antara jahe dengan pohon jati yang dapat digunakan untuk bahan baku perusahaan mebel. (www.solo-kedu.com)

a. Tanaman Pangan

Kabupaten Klaten merupakan penghasil padi terbanyak kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Sukoharjo. Produksi paling besar adalah padi sawah dengan luas panen 54.803 hektar, produksi 301.683 ton tiap tahun dan produktivitas rata-rata 55,05 kuintal/hektar. Padi ladang, memiliki luas panen 282 hektar, produksi 857 ton, dan produktivitas rata-rata 30,39 kuintal/hektar. Jagung, memiliki luas panen 7.994 hektar, produksi 31.467 ton, dan produktivitas rata-rata 39,36 kuintal/hektar. Ubi kayu, memiliki luas panen 1.072 hektar,

produksi 18.109 ton, dan produktivitas rata-rata 169 kuintal/hektar. Kedele, memiliki luas panen 4.105 hektar, produksi 5.521 ton, dan produktivitas rata-rata 13,45 kuintal/hektar. Kacang tanah, memiliki luas panen 3.655 hektar, produksi 4.125 ton, dan produktivitas rata-rata 11,29 kuintal/hektar. Kacang hijau, memiliki luas panen 247 hektar, produksi 257 ton, dan produktivitas rata-rata 10,42 kuintal/hektar. Ubi jalar, memiliki luas panen 6 hektar, produksi 75 ton, dan produktivitas rata-rata 126 kuintal/hektar.

b. Tanaman Buah-buahan

Buah-buahan merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Klaten. Yang terkenal dari Kabupaten ini adalah rambutan yang banyak dan manis. Secara umum buah-buahan di Kabupaten Klaten dibudidayakan oleh masyarakat umum. Selain rambutan, Kabupaten Klaten juga memiliki komoditi unggulan lainnya seperti pisang raja, pisang susu, mangga, duku, durian, pepaya, dan melinjo. Buah-buahan yang lain pun banyak terdapat di kabupaten ini tetapi memiliki kemiripan dengan daerah lain. Produktivitas yang tinggi dan terus meningkat tiap tahunnya menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Seperti komoditi durian yang memiliki luas panen 14.963 pohon dengan produksi tiap tahunnya 8.987 ton merupakan komoditi yang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan lokal bahkan hingga mancanegara. Lahan yang subur, luas

dan iklim yang sangat sesuai menjadikan daya dukung tersendiri tingginya produktivitas buah-buahan di Kabupaten Klaten.

c. Tanaman Obat-obatan

Obat-obatan merupakan kebutuhan dasar dan menjadi salah satu kebutuhan mutlak keluarga. Bahkan dewasa ini ada kecenderungan pergeseran penggunaan obat-obat kimiawi ke arah obat-obat alami. Banyak studi-studi yang dilakukan perguruan tinggi untuk mengkaji obat-obatan alami. Hal ini menjadi salah satu tuntutan jaman yang harus dilakukan. Akan tetapi tuntutan tersebut dapat dipenuhi oleh Kabupaten Klaten. Daerah ini memiliki produktivitas tanaman obat-obatan yang cukup tinggi. Tanaman obat-obatan yang menjadi unggulan adalah komoditi jahe, laos/lengkuas, kunyit, temulawak, lempuyang, temuireng dan mulai dikembangkan mengkudu. Kebutuhan tanaman obat-obatan ini ternyata sangat tinggi. Bukan hanya untuk kedokteran tetapi juga untuk jamu-jamu tradisional baik yang diproduksi secara massal oleh pabrik-pabrik modern maupun diproduksi secara konvensional. Jamu merupakan salah satu peninggalan nenek moyang masyarakat Jawa maka tradisinya pun tetap melekat hingga kini.

Peluang bisnis di bidang tanaman obat-obatan menjadi terbuka lebar. Baik peluang bisnis untuk diolah menjadi obat modern maupun untuk jamu-jamu tradisional. Begitu pula Kabupaten Klaten yang

memiliki potensi produksi tanaman obat-obatan yang sangat besar dan beragam.

d. Sayur-sayuran

Tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Klaten juga cukup berpotensi. Sebagian besar sayuran yang dibudidayakan adalah jenis cabe yaitu cabe besar dan cabe kecil. Produktivitas tiap tahunnya relatif besar yaitu 29,5 kg/pohon dan memiliki luas panen 1.314 pohon. Komoditi ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk ekspor. Peluang bisnis di bidang sayur-sayuran ini sangat besar terutama pada jasa pengangkutan maupun pengolahan. Sebagian besar hasil komoditi dari Kabupaten Klaten dimanfaatkan untuk masyarakat sekitarnya saja.

e. Tanaman Hias

Kabupaten Klaten selain memiliki komoditi sayuran dan tanaman makanan juga memiliki potensi tanaman hias. Produksi tanaman hias juga cukup tinggi di mana dari tahun ke tahun ternyata peminat tanaman hias semakin bertambah bukan hanya dari sekitar Kabupaten Klaten tetapi juga dari wilayah sekitarnya. Peluang bisnis di bidang ini cukup besar, mengingat permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri yang cukup besar.

F. Kondisi Sosial Budaya

1. Kependudukan

Dalam kurun waktu 1 tahun, penduduk Kabupaten Klaten mengalami kenaikan 5,58 persen menjadi 1.293.424 jiwa. Sedangkan pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 0,56 persen bila dibandingkan tahun 2005. Dampak dari pertumbuhan penduduk salah satunya adalah kepadatan penduduk. Selama lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan dari 1.962/km² menjadi 1.973/km². Tingkat kepadatan penduduk yang paling besar ada di Klaten Tengah sebesar 4.901/km², sedangkan yang terendah di Kecamatan Kemalang sebesar 666/km².

Untuk komposisi penduduk, jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki dengan rata-rata perbandingan 49 : 51. Sedangkan penduduk usia produktif (usia 15-65 Tahun) sebesar 66,93 persen dari total penduduk Kabupaten Klaten.

2. Ketenagakerjaan

Dengan penambahan penduduk maka ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni masalah ketenagakerjaan. Dari kelompok umur produktif, kelompok umur 15-19 tahun merupakan jumlah terbesar. Pada tahun 2006 jumlah pencari kerja sebanyak 15.762 orang, dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMU/SMK sebanyak 11.685 orang, kondisi ini menunjukkan penurunan 18,61 persen dibanding tahun 2005.

3. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kebudayaan dapat berupa barang, jasa, karya maupun pemikiran. Dalam hal ini, kebudayaan yang akan dibicarakan adalah karya manusia berupa barang, yang berbentuk candi, masjid dan makam. Hingga tahun 2008, unsur kebudayaan di Kabupaten Klaten yang berupa situs bersejarah masih tetap utuh. Hal ini menunjukkan, bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Klaten sangat tinggi terhadap pelestarian kebudayaan. Banyak situs bersejarah, baik yang berupa candi, masjid dan makam mengindikasikan bahwa Kabupaten Klaten pada masa lampau telah memiliki kekayaan budaya yang di dalamnya memiliki nuansa religius.

4. Agama

Kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga, seperti masjid, gereja, dan pesantren.

Jumlah tempat peribadatan menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.

G. Pemerintahan

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa swasembada.

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Cawas sebanyak 20 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kalikotes dan Kecamatan Kebonarum, masing-masing 7 desa.

2. Kepegawaian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, Tahun 2008, PNS Golongan III memiliki jumlah tertinggi, yaitu sebesar 7.175 orang. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Golongan I menduduki jumlah paling kecil, yaitu 525 orang pada semester I tahun 2008.

Mengingat kapasitas aparatur yang beragam maka perhatian terhadap peningkatan kualitas aparatur pemerintah harus selalu ditingkatkan (kaderisasi dan *skill*), karena akan berdampak pada kualitas pelayanan pada masyarakat dan dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintahan.

3. Organisasi Daerah

Keorganisasian daerah Kabupaten Klaten terdiri dari 7, yaitu sekretariat dewan, sekretariat daerah, kecamatan, dinas, bagian, kantor, dan badan sebagaimana disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Organisasi Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2003-2008

No	Organisasi Daerah	Jumlah					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Sekretariat Dewan	1	1	1	1	1	1
2	Sekretariat Daerah	1	1	1	1	1	1
3	Badan	4	4	4	4	4	4
4	Dinas	7	7	7	7	7	7
5	Kantor	12	12	12	12	13	13
6	Bagian	8	8	8	8	8	8
7	Kecamatan	26	26	26	26	26	26
	Jumlah	59	59	59	59	60	60

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2008
Data Tahun 2008 adalah Data Semester I

Dari tahun 2003 hingga semester I tahun 2008 tidak ada perubahan, kecuali pada jumlah kantor bertambah 1 yaitu kantor pelayanan terpadu, sehingga jumlah kantor menjadi 13 untuk tahun 2007. Perubahan struktur akibat otonomi daerah harus tetap mengacu pada aspek efektivitas dan efisiensi dan bukan tujuan yang lain.

4. Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten pada tahun 2006 telah menerbitkan sertifikat sebanyak 12.478 buah. Sebanyak 96,62 persen merupakan sertifikat hak milik.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Klaten ini adalah untuk mengetahui kontribusi pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, efektivitas dan efisiensi, serta bagaimana hubungan pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah, yang memuat data realisasi penerimaan pariwisata serta dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD), yang memuat data belanja Kantor Pariwisata.

Pendapatan Pariwisata merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Pariwisata Kabupaten Klaten terdiri dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bidang Kepariwisata.

A. Analisis Data

1. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dilakukan analisis untuk mengetahui berapa besar Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten, dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Pendapatan Sektor pariwisata} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Untuk dapat mempermudah dalam melakukan perhitungan, maka disajikan Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten selama lima tahun, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 5.1
Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2003	620.416.531	22.277.799.164	2,78
2004	772.353.778	27.078.142.930	2,85
2005	837.459.477	33.549.822.148	2,49
2006	393.463.600	39.493.727.943	0,99
2007	421.950.000	52.110.860.092	0,81
Rata-rata	609.128.677	34.902.070.455	1,98

Sumber : DIPENDA Kabupaten Klaten (data diolah penulis)

2. Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata

Menghitung Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata dengan rumus sebagai berikut: (Mahmudi, 2007:129)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektif tidaknya Pendapatan Sektor Pariwisata digunakan kriteria sebagai berikut: (Anthony-Dearden-Bedford,1993:10)

- (1) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata) semakin besar (>100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Sektor Pariwisata) maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata semakin efektif.
- (2) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata) semakin kecil (<100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Sektor Pariwisata) maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata kurang efektif.

Tabel 5.2
Efektivitas Pendapatan Pariwisata Kabupaten Klaten
Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	keterangan
2003	620.416.531	608.935.000	101,86	efektif
2004	772.353.778	696.000.000	110,97	efektif
2005	837.459.477	830.500.000	100,83	efektif
2006	393.463.600	408.260.000	96,37	tdk. efektif
2007	421.950.000	435.300.000	96,93	tdk. efektif
Rata-rata	609.128.677	595.799.000	101,40	efektif

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah penulis)

3. Efisiensi Belanja Sektor Pariwisata

Menghitung Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Sektor Pariwisata}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata}} \times 100\%$$

Karena dalam penelitian ini yang dilihat adalah kecenderungan efisiensi apakah semakin naik, semakin turun, atau relatif sama maka semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan kinerja pariwisata semakin baik.

Tabel 5.3
Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2003 sampai dengan 2007

Tahun	Belanja Sektor Pariwisata (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Efisiensi (%)	keterangan
2003	955.050.000	620.416.531	153,93	tdk. efisien
2004	1.550.430.000	772.353.778	200,74	tdk. efisien
2005	1.790.560.000	837.459.477	213,81	tdk. efisien
2006	2.314.947.000	393.463.600	588,35	tdk. efisien
2007	5.629.338.000	421.950.000	1.334,12	tdk. efisien
Rata-rata			498,19	tdk. efisien

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah penulis)
Dinas Pariwisata Kab. Klaten

Untuk mengetahui kecenderungan efisiensi Pendapatan Pariwisata Kabupaten Klaten selama lima tahun anggaran tersebut dapat diketahui melalui trend efisiensi dengan menggunakan analisis *Least Square* dengan rumus:

$$Y' = a + bx$$

Dimana :

Y' = trend efisiensi Pendapatan sektor Pariwisata

a = konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai Y apabila $x = 0$

b = variabilitas permintaan x yaitu besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan suatu unit x

x = tahun

tabel 5.4 menunjukkan trend efisiensi Pendapatan Pariwisata

Tabel 5.4
Trend Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2003 sampai dengan 2007

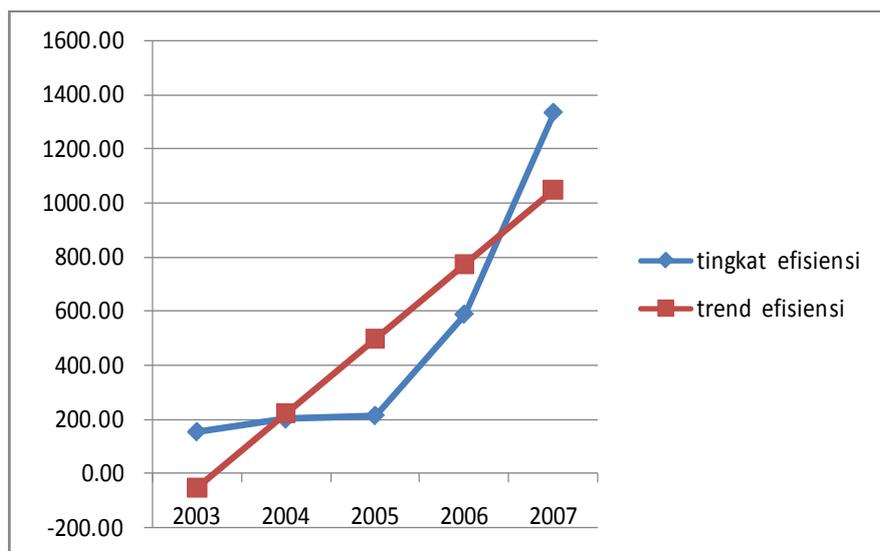
Tahun	Tingkat Efisiensi	X	XY	X ²	Y' (%)
2003	153,93	-2	-307,86	4	-51,40
2004	200,74	-1	-200,74	1	223,39
2005	213,81	0	0	0	498,19
2006	588,35	1	588,35	1	772,99
2007	1.334,12	2	2.668,24	4	1.047,79
jumlah	2.490,97		2.747,99	10	

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{2.747,99}{5} = 498,19 \quad b = \frac{\sum XY}{\sum x^2} = \frac{2.747,99}{10} = 274,80$$

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa Belanja Pariwisata cenderung naik dan tidak diikuti kenaikan pendapatan atau dengan kata lain Pendapatan Pariwisata Kabupaten Klaten semakin tidak efisien.

Jika menggunakan grafik akan tampak seperti berikut :



4. Korelasi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur seberapa pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Klaten dilakukan analisis *Product Moment*. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. (Sugiyono, 2002:212)

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 12.0 for windows, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5.5
Output Korelasi
SPSS 12.0

		pad	pariwisata
pad	Pearson Correlation	1	-.638
	Sig. (2-tailed)	.	.246
	N	5	5
pariwisata	Pearson Correlation	-.638	1
	Sig. (2-tailed)	.246	.
	N	5	5

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui korelasi antara Pendapatan Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,638. Angka tersebut menunjukkan korelasi yang kuat, sedangkan tanda '-' menunjukkan arah yang berkebalikan.

Bagian kedua dari tabel di atas menjelaskan apakah hasil uji korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel.

Hipotesis :

Ho : Tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah

Ha : Terdapat hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah.

Dasar pengambilan keputusan :

a. Berdasarkan Probabilitas

- 1) Jika Probabilitas $> 0,05$, maka Ho diterima,
- 2) Jika Probabilitas $< 0,05$, maka Ho ditolak.

Dari tabel output di atas menunjukkan bahwa probabilitas 0,246 lebih besar dari 0,05 (Ho diterima) atau dengan kata lain tidak ada hubungan yang signifikan antara pendapatan pariwisata dengan pendapatan asli.

b. Berdasarkan tanda * yang diberikan SPSS

Signifikan tidaknya korelasi dua variabel bisa dilihat dari adanya tanda * pada pasangan data yang dikorelasikan. Dari tabel output korelasi diatas tidak terdapat tanda *, maka dapat diterjemahkan, korelasi antara Pendapatan Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5.6
Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007

Tahun Anggaran	Pendapatan Sektor Pariwisata (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)
2003	620.416.531	22.277.799.164	2,78
2004	772.353.778	27.078.142.930	2,85
2005	837.459.477	33.549.822.148	2,49
2006	393.463.600	39.493.727.943	0,99
2007	421.950.000	52.110.860.092	0,81
Rata-rata	609.128.677	34.902.070.455	1,98

Sumber : Dipenda Kab. Klaten(data diolah penulis)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Klaten hanya berkisar antara 0,81 % sampai 2,85 %. Dari tingkat kontribusi dapat dilihat bahwa Pendapatan Sektor Pariwisata memberikan kontribusi kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah di kab. Klaten.

Rata-rata kontribusi yang diberikan Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah 1,98 %. Sedangkan kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi 2,85 % dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2007 dengan kontribusi 0,81 %.

2. Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata

Table 5.7
Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata
Tahun 2003 sampai dengan 2007

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2003	620.416.531	608.935.000	101,86	efektif
2004	772.353.778	696.000.000	110,97	efektif
2005	837.459.477	830.500.000	100,83	efektif
2006	393.463.600	408.260.000	96,37	tdk. efektif
2007	421.950.000	435.300.000	96,93	tdk. efektif
Rata-rata	609.128.677	595.799.000	101,40	efektif

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah penulis)

Hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan kemampuan Kantor Pariwisata dalam menjalankan tugas pemungutan pendapatan pariwisata cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil penerimaan pendapatan pariwisata, mencapai target yang diharapkan, dengan rata-rata rasio efektivitas 101,40 % dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Tetapi jika dilihat dari target pendapatan dari tahun ke tahun yang cenderung mengalami penurunan diikuti pula dengan penurunan rasio efektivitas, nampaknya kinerja pemungutan pendapatan sektor pariwisata belum optimal. Tahun 2006 target pendapatan pariwisata Rp 408.260.000 dengan realisasi Rp 393.463.600, sehingga rasio efektivitas sebesar 96,37% merupakan rasio efektivitas terendah. Sedangkan rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 110,97 % dengan target pendapatan pariwisata Rp 696.000.000 dan realisasinya Rp 772.338.778.

3. Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata

Tabel 5.8
Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2003 sampai dengan 2007

Tahun	Belanja Sektor Pariwisata (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Efisiensi (%)	keterangan
2003	955.050.000	620.416.531	153,93	tdk. efisien
2004	1.550.430.000	772.353.778	200,74	tdk. efisien
2005	1.790.560.000	837.459.477	213,81	tdk. efisien
2006	2.314.947.000	393.463.600	588,35	tdk. efisien
2007	5.629.338.000	421.950.000	1.334,12	tdk. efisien
Rata-rata			498,19	tdk. efisien

Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah penulis)
Dinas Pariwisata Kab. Klaten

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari yang terendah pada tahun 2003 sebesar 153,9 % menjadi 1.334 % pada tahun 2007, dan dengan rata-rata tingkat efisiensi 498,19 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten semakin tidak efisien.

4. Korelasi

Dari perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui bahwa antara Pendapatan Sektor Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten menunjukkan hubungan negatif yaitu sebesar 0,638, tidak signifikan (H_0 diterima) atau dengan kata lain menunjukkan tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tertinggi terjadi pada tahun 2004, dengan nilai kontribusi sebesar 2,85 %, kontribusi terendah terjadi pada tahun anggaran 2007 yaitu sebesar 0,81 % dengan rata-rata kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata sebesar 1,98 %. Berdasarkan nilai rata-rata kontribusi pendapatan sektor pariwisata dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2007 yang hanya sebesar 1.98 % dari total pendapatan asli daerah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kurun waktu yang diteliti, pemerintah Kabupaten Klaten belum dapat mengandalkan Pendapatan Sektor Pariwisata sebagai unggulan dalam penyusun Pendapatan Asli Daerah.
2. Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata tertinggi terjadi pada tahun 2004 dengan nilai 110,97 %, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2006 dengan nilai 96,37%, dan rata-rata nilai efektivitas sebesar 101,40 %. Dengan nilai rata-rata efektivitas 101,40 %, pendapatan sektor pariwisata

masuk dalam kategori efektif karena realisasi pendapatan telah melampaui target yaitu 100 %.

3. Efisiensi Pendapatan Pariwisata Kabupaten Klaten berkisar antara 153,93 % sampai dengan 1.334,12 %, dengan rata-rata 498,19 %. Pendapatan Pariwisata Kabupaten Klaten cenderung tidak efisien karena realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan.
4. Dari hasil perhitungan korelasi *product moment* antara pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai r sebesar $-0,638$ dan tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Keterbatasan Masalah

1. Semua data yang ada dalam penelitian ini berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari Kantor Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah. Data tersebut diterima dengan asumsi bahwa semua data adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.
2. Untuk menentukan efisiensi penulis tidak menggunakan biaya pemungutan seperti dalam rumus asli yang dikemukakan Mahmudi, namun menggunakan total belanja pariwisata. Hal ini dikarenakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten tidak terdapat data mengenai biaya pemungutan. Untuk perhitungan efisiensi, penulis menggunakan data belanja setelah perubahan, bukan realisasi belanja.

3. Dalam menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah efektivitas dan efisiensi penulis melakukan sedikit penyesuaian rumus asli agar sesuai dengan data yang diperoleh.

C. Saran

1. mengingat besarnya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Klaten, maka hendaknya Dinas Pariwisata dapat lebih bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan cara menaikkan penerimaan pendapatan pariwisata, misalnya dengan melakukan penertiban retribusi izin usaha bidang pariwisata.
2. Dalam penelitian ini, pendapatan pariwisata Kabupaten Klaten sudah dapat dikategorikan efektif, namun untuk lebih meningkatkan rasio efektivitas dapat dilakukan perencanaan penerimaan pendapatan pada awal tahun anggaran.
3. Untuk mencapai efisiensi pendapatan pariwisata, dapat dilakukan seleksi belanja yang bersifat jangka pendek pada saat perencanaan anggaran belanja, misalnya mengurangi anggaran perjalanan dinas.
4. Diperlukan kreativitas yang tinggi dalam mengemas pariwisata dan bahkan menciptakan tempat wisata baru sangat mungkin dilakukan karena karakteristik wilayah Klaten yang mendukung seperti halnya terletak di lereng Gunung Merapi yang memiliki banyak sumber mata air yang dapat digunakan untuk membuat tempat wisata baru misalnya wahana wisata air yang nantinya selain sebagai penambah pendapatan daerah juga dapat

menaikkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga dapat mendatangkan investor baik dari Klaten sendiri maupun luar Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008*. Klaten: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
- Anthony-Dearden-Bedford. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen 1*. Jakarta. Binarupa Aksara.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Buku 1 PT Salemba Empat Patria.
- Davey. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Cetakan Pertama UI-Press.
- Devas, Nick. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah. Di Indonesia* (Maris Masri, 1989, penerjemah). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPA STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andy.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2001). Jakarta: PT Mitra Info.
- Republik Indonesia. Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Sidik, Machmud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.

Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Syamsi, Ibnu. 1983. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.

Widjaja, H.A.W. 2001. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

www.arison.blogspot.com

www.pariwisata-klaten.com

http://www.solo-kedu.com/solo-kedu/Wilayah/tani_klaten.htm

www.library.usus.ac.id

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 95
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Jln Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272) 321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 072/451/III/11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 3. Surat Rekomendasi ijin dari Ketua Program Study Akuntansi USD Yogyakarta Nomor: m31/Kaprodi Akt/321/X/2008 Tanggal: 9 Oktober 2008

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Nama : Niko Setyahadi
 Pekerjaan/Mahasiswa : Mhs. Univ. Sanata Dharma Yogyakarta
 Alamat : Jl. Klaten Solo km 6 Jombor, Ceper, Klaten
 Penanggungjawab : Drs. Yusef Widya Karsana, Msi, Akt
 Judul/Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Klaten.
 Lokasi : Kabupaten Klaten
 Lamanya : 3 Bulan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil penelitian/survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar.
2. Sebelum melaksanakan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat.
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya

Tembusan surat ini dikirim Kepada :

1. Kakan Kesbanglinmas Kabupaten Klaten
2. Ka. Dipenda Kab. Klaten
3. Ka. Pariwisata Kab. Klaten
4. Ketua Program Study Akuntansi USD
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Klaten, 15 Oktober 2008
 BUPATI KLATEN
 Kepala Badan Perencanaan Daerah
 U. Sekretaris



AGUS Y. ANUARI, SE, MSI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 500 082 624

96

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin
Penyelenggaraan Di Bidang
Kepariwisata

DAFTAR TARIF
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

NO	JENIS USAHA	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	USAHA JASA PARIWISATA		
	1. Jasa Biro-Perjalanan Wisata	Rp. 250.000,-	Per izin
	2. Jasa Agen Perjalanan Wisata	Rp. 200.000,-	Per izin
	3. Jasa Pramuwisata	Rp. 50.000,-	Per izin
	4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	Rp. 100.000,-	Per izin
	5. Jasa Impresariat	Rp. 100.000,-	Per izin
	6. Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 100.000,-	Per izin
	7. Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 100.000,-	Per izin
II.	PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA		
	1. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Alam		
	a. Pemandangan Alam dan atau Buatan	Rp. 250.000,-	Per izin
	b. Danau, Waduk dan Sungai	Rp. 250.000,-	Per izin
	c. Goa-goa	Rp. 200.000,-	Per izin
	d. Taman-taman	Rp. 250.000,-	Per izin
	e. Hutani	Rp. 250.000,-	Per izin
	f. Kebun Binatang dan atau Kebun Raya	Rp. 250.000,-	Per izin
	2. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Budaya		
	a. Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Rp. 125.000,-	Per izin
	b. Art Galery	Rp. 125.000,-	Per izin
	3. Usaha Obyek Wisata Daya Tarik Wisata Minat Khusus	Rp. 100.000,-	Per izin
	4. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum		
	a. Bar	Rp. 250.000,-	Per izin
	b. Café	Rp. 200.000,-	Per izin
	c. Pub	Rp. 250.000,-	Per izin
	d. Bioskop	Rp. 250.000,-	Per izin
	e. Rumah Billiard (Bola Sodik)	Rp. 250.000,-	Per izin
	f. Rumah Billiard (Bola Sodik)	Rp. 25.000,-	Per Meja / tahun
	g. Pantj Pijat	Rp. 200.000,-	Per izin
	h. Pantj Pijat	Rp. 15.000,-	Per kamar / tahun
	i. Permainan Hiburan	Rp. 200.000,-	Per izin
	j. Permainan Hiburan	Rp. 15.000,-	Per Unit / tahun
	k. Play Stafion	Rp. 100.000,-	Per izin
	l. Play Stafion	Rp. 10.000,-	Per Unit / tahun
	m. Dunia Fantasi	Rp. 150.000,-	Tiap fasilitas
	n. Taman Satwa dan Pentas Satwa	Rp. 200.000,-	Per izin
	o. Pentas Satwa	Rp. 10.000,-	Per Hari
	p. Gelanggang Renang	Rp. 100.000,-	Per izin
	q. Koiam Memancing	Rp. 100.000,-	Per izin
	r. Balai Pertemuan Umum Besar	Rp. 250.000,-	Per izin

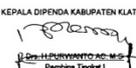
1	2	3	4
	s. Balai Peremuan Umum Kecil	Rp. 50.000,-	Per izin
	t. Barbershop	Rp. 100.000,-	Per izin
	u. Salon Rias	Rp. 100.000,-	Per izin
	v. Taman Rekreasi	Rp. 150.000,-	Per izin
	w. Hiburan Keliling / Pasar Malam	Rp. 200.000,-	Per Izin
	x. Hiburan Keliling / Pasar Malam	Rp. 5.000,-	Per Unit / malam
	y. Pentas Musik	Rp. 75.000,-	Per Kegiatan
	z. Pentas Satwa	Rp. 10.000,-	Per Hari
	aa. Olah Raga Komersial Besar	Rp. 75.000,-	Per Kegiatan
	bb. Olah Raga Komersial Kecil	Rp. 50.000,-	Per Kegiatan
III.	USAHA SARANA PARIWISATA		
	I. Penyediaan akomodasi		
	a. Hotel		
	- Hotel Bintang II	Rp. 300.000,-	Per Izin
	- Hotel Bintang II	Rp. 30.000,-	Per Kamar/Tahun
	- Hotel Bintang I	Rp. 250.000,-	Per Izin
	- Hotel Bintang I	Rp. 25.000,-	Per Kamar/Tahun
	- Hotel Melati III	Rp. 200.000,-	Per Izin
	- Hotel Melati III	Rp. 20.000,-	Per Kamar/Tahun
	- Hotel Melati II	Rp. 150.000,-	Per Izin
	- Hotel Melati II	Rp. 15.000,-	Per Kamar/Tahun
	- Hotel Melati I	Rp. 100.000,-	Per Izin
	- Hotel Melati I	Rp. 10.000,-	Per Kamar/Tahun
	b. Usaha Pondok Wisata		
	- Pondok Wisata Lingkaran Biru	Rp. 200.000,-	Per Izin
	- Pondok Wisata Lingkaran Kuning	Rp. 150.000,-	Per Izin
	- Pondok Wisata Lingkaran Merah	Rp. 100.000,-	Per Izin
	c. Usaha Bumi Perkemahan		
	- Perkemahan Kelas Ideal	Rp. 200.000,-	Per izin
	- Perkemahan Kelas Lengkap	Rp. 150.000,-	Per izin
	- Perkemahan Kelas Sedang	Rp. 100.000,-	Per izin
	- Perkemahan Kelas Sederhana	Rp. 100.000,-	Per izin
	2. Usaha Penyediaan Makan Dan Minum		
	a. Restoran/Rumah Makan		
	- Piring Emas	Rp. 250.000,-	Per Izin
	- Piring Perak	Rp. 200.000,-	Per Izin
	- Piring Perunggu	Rp. 150.000,-	Per Izin
	b. Jasa Boga		
	- Kelas A	Rp. 200.000,-	Per Izin
	- Kelas B	Rp. 150.000,-	Per Izin
	- Kelas C	Rp. 100.000,-	Per Izin
	3. Usaha Penyediaan angkutan Wisata	Rp. 250.000,-	Per Izin
	4. Usaha Sarana Wisata Tirta	Rp. 200.000,-	Per Izin



M. HARYANTO

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REKAPITULASI										
Pos Pajak Daerah	7.768.000.000	8.605.562.041	10.015.000.000	10.291.535.387	11.115.000.000	9.732.205.843	11.490.000.000	13.052.631.723	13.340.000.000	14.638.314.886
Pos Retribusi Daerah	7.104.139.000	7.720.125.608	9.069.038.000	8.506.221.694	10.940.682.000	10.771.625.836	10.760.800.000	10.429.466.034	10.153.912.000	9.995.101.398
- Retribusi Lain-BUMD	13.560.000.000	11.846.406.000	1.291.900.000	1.193.328.000	3.130.206.000	3.596.768.218	2.476.939.000	2.451.276.932	2.990.877.900	2.187.988.810
- Lain-lain PAD yang Tetap	4.120.889.000	4.805.705.515	5.487.365.000	7.083.027.869	8.611.500.000	8.449.222.251	11.032.743.000	13.560.199.334	15.370.400.000	25.380.654.908
- DMLAH A (BAGIAN PAD)	20.361.028.000	22.277.799.164	23.862.400.000	27.078.142.930	33.857.388.000	33.549.822.148	33.760.002.000	39.493.727.943	41.833.189.000	52.110.860.092
V. Pos Bagi Hasil Pajak	15.800.512.000	21.993.885.243	16.748.643.092	24.408.273.496	19.632.588.000	27.393.891.861	27.215.857.000	28.029.465.737	25.477.765.000	31.843.114.000
VI. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	923.151.000	671.911.144	923.151.000	737.883.064	923.151.000	478.281.288	478.280.000	428.769.896	526.107.000	603.579.336
JUM B (BAG. DANA PERMIBANGAAN)	16.723.663.000	22.665.796.387	17.671.794.092	25.146.157.460	20.555.739.000	27.872.173.149	27.694.137.000	28.458.235.633	26.003.872.000	32.446.693.426
VII. Dana Alokasi Umum	409.286.136.000	409.386.136.000	382.345.000.000	382.345.000.000	404.869.000.000	404.869.000.000	635.488.000.000	635.488.000.000	694.207.000.000	694.207.000.000
JUM C (BAG. D A U)	409.386.136.000	409.386.136.000	382.345.000.000	382.345.000.000	404.869.000.000	404.869.000.000	635.488.000.000	635.488.000.000	694.207.000.000	694.207.000.000
VIII. Alokasi ABT-Bencana Alam	5.000.000.000	3.750.000.000	-	-	-	-	-	-	6.127.388.000	6.127.388.000
JUMLAH D (POS DANA DARURAT)	5.000.000.000	3.750.000.000	-	-	-	-	-	-	6.127.388.000	6.127.388.000
IX. Pos Dana Alokasi Khusus	5.300.000.000	3.710.000.000	10.030.000.000	10.030.000.000	11.900.000.000	11.900.000.000	27.530.000.000	27.517.927.000	50.867.000.000	50.867.000.000
JUM D (BAG. DANA ALOKASI KHUSUS)	5.300.000.000	3.710.000.000	10.030.000.000	10.030.000.000	11.900.000.000	11.900.000.000	27.530.000.000	27.517.927.000	50.867.000.000	50.867.000.000
X. Pos Perencanaan Dari Propinsi	16.895.906.000	16.689.803.746	20.929.042.850	24.378.474.327	19.659.655.000	24.908.461.950	30.054.896.000	34.067.033.034	46.841.081.000	45.886.706.562
JUMLAH E (BANTUAN DARI PROPINSI)	16.895.906.000	16.689.803.746	20.929.042.850	24.378.474.327	19.659.655.000	24.908.461.950	30.054.896.000	34.067.033.034	46.841.081.000	45.886.706.562
XI. Pos Perencanaan Dari Pem. Pusat	-	-	32.824.108.000	32.824.847.000	30.905.000.000	30.980.770.000	-	-	-	-
JUMLAH F (PEN. DARI PEM. PUSAT)	-	-	32.824.108.000	32.824.847.000	30.905.000.000	30.980.770.000	-	-	-	-
XII. Pos Utusan dan Perhitungan	34.115.408.000	33.254.022.345	-	-	-	-	-	-	-	-
JUM G (BAG. URUSAN KAS & PERHIT.)	34.115.408.000	33.254.022.345	-	-	-	-	-	-	-	-
JUM. AH SEMUA (A+B+C+D+E+F)	507.782.141.000	511.783.357.642	489.662.344.942	501.928.631.717	521.146.782.000	534.080.227.247	756.527.033.000	765.035.536.210	855.900.531.000	881.615.647.780

RAJ, 2008/01/20

Klaten, 2008
 KEPALA DIPENDIA KABUPATEN KLATEN

 Pembina Tingkat I
 NIP. 500 082 414



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

Nomor : 1081 / 2003

Tanggal : 30 September 2003

TENTANG
PENJABARAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2003

REKAP PER SEKTOR
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2003

SEKTOR	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				KENAIKAN % DARI SEBELUM PERUBAHAN
	JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	BERTAMBAH (BERKURANG)	JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	PROSENTASE (%)	
Sektor 1 Pengelolaan Keuangan Daerah	3	500,000,000	0	3	500,000,000	0.41	-
Sektor 2 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3	375,000,000	0	3	375,000,000	0.31	-
Sektor 3 Perusahaan Daerah	1	150,000,000	0	1	150,000,000	0.12	-
Sektor 4 Penanaman Modal dan Pemasaran Daerah	6	632,000,000	49,500,000	6	681,500,000	0.56	7.83
Sektor 5 Industri, Perdagangan, Koperasi dan PKM	22	2,834,750,000	81,500,000	24	2,916,250,000	2.38	2.88
Sektor 6 Pariwisata	12	1,016,050,000	(61,000,000)	12	955,050,000	0.78	(6.00)
Sektor 7 Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Kehutanan	31	4,116,500,000	477,000,000	33	4,593,500,000	3.76	11.59
Sektor 8 Pos dan Telekomunikasi	0	0	0	0	0	0	-
Sektor 9 Pertambangan dan Energi	2	250,000,000	0	2	250,000,000	0.20	-
Sektor 10 Pemberdayaan Daerah	36	9,629,000,000	2,562,977,000	42	12,191,977,000	9.97	26.62
Sektor 11 Politik	4	418,500,000	585,000,000	6	1,003,500,000	0.82	139.78
Sektor 12 Hukum	9	344,123,000	65,000,000	9	409,123,000	0.33	18.89
Sektor 13 Ketentraman dan Ketertiban	9	536,000,000	645,915,000	10	1,181,915,000	0.97	120.51
Sektor 14 Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	56	21,355,509,000	3,740,089,000	58	25,095,598,000	20.52	17.51
Sektor 15 Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	40	6,869,645,000	104,375,000	40	6,974,020,000	5.70	1.52
Sektor 16 Kependudukan dan Ketenagakerjaan	16	1,111,585,000	145,200,000	16	1,256,785,000	1.03	13.06
Sektor 17 Agama	5	500,000,000	150,000,000	5	650,000,000	0.53	30.00
Sektor 18 Pemberdayaan Perempuan	3	95,000,000	0	3	95,000,000	0.08	-
Sektor 19 Informasi dan Kehumasan	7	266,500,000	0	7	266,500,000	0.22	-
Sektor 20 sarana dan Prasarana jalan	34	17,176,273,000	5,683,887,000	42	22,860,160,000	18.69	33.09
Sektor 21 sarana dan Prasarana Irigasi	15	8,336,200,000	2,954,000,000	21	11,290,200,000	9.23	35.44
Sektor 22 Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung	18	3,025,000,000	790,800,000	20	3,815,800,000	3.12	26.14
Sektor 23 Pembangunan Perkotaan	17	2,579,000,000	103,500,000	17	2,682,500,000	2.19	4.01
Sektor 24 Penataan Ruang	2	147,500,000	0	2	147,500,000	0.12	-
Sektor 25 Lingkungan Hidup	10	490,000,000	0	10	490,000,000	0.40	-
Sektor 26 Pembangunan Perwilayahan	53	15,866,263,000	4,064,399,000	56	19,930,662,000	16.29	25.62
Sektor 27 Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi	19	1,431,000,000	120,000,000	20	1,551,000,000	1.27	8.39
JUMLAH	433	100,051,398,000	22,262,142,000	468	122,313,540,000	100	22.25

PASAL	SEKTOR / SUB SEKTOR / PROGRAM / PROYEK	KETERANGAN (STANDAR BIAYA, TUJUAN, SASARAN, ,LOKASI)	JUMLAH DANA (Rp.)	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
2P.0.6 SEKTOR PARIWISATA				
2P.0.6.1.	SUB SEKTOR PARIWISATA			
2P.0.6.1.01	Program Pengembangan Pariwisata			
2P.0.6.1.01	001	Proyek Pameran Pariwisata Bersama (Dana Daerah Lainnya / DDL)	Tidak ada Perubahan Anggaran	Kantor Pariwisata
2P.0.6.1.01	002	Proyek Master Plan Rowo Jombor (Dana Daerah Lainnya / DDL)	Tidak ada Perubahan Anggaran	BAPEDA
2P.0.6.1.02	Program Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pariwisata			
2P.0.6.1.02	001	Proyek Pembangunan, Penataan dan Bar A. Standard Biaya tujuan Pemeliharaan Obyek Wisata di Kabupaten Klaten (Dana Daerah Lainnya / DDL)	A. Standard Biaya Semula Rp. 281.050.000 Bertambah/Berkurang Rp. 14.000.000 Rp. 295.050.000	Kantor Pariwisata
		Sebelum Perubahan		
		1. Persiapan	Rp. 5.621.000	
		2. Pelaksanaan:		
		a. OW Jombor Permai		
		- Rehab Jalan Naik 4 x 200 m	Rp. 17.000.000	
		- Penataan halaman panggung 3 x 160 m dan pembuatan tribun	Rp. 35.000.000	
		- Rehab panggung lama utk tamu VI 6 x 6 m	Rp. 13.800.000	
		b. OW Sendang Piampean		
		- Pemasangan besi pemisah jalur (1,5 m x 30 m) 3 buah	Rp. 14.000.000	
		- Rehab pagar pengaman sendang 1 m x 20 m	Rp. 10.000.000	
		- Pembualan saluran penguras sendang (1 m x 20 m)	Rp. 7.500.000	
		- Rehab Langgar Soran (3 x 3 m)	Rp. 12.500.000	
		c. OW Sumber Air Ingas		
		- Pemasangan Paving 2 m x 160 m	Rp. 13.000.000	
		- Penataan Taman bermain 70 m ² dan pengadaan mainan anak	Rp. 34.200.000	

Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Kab Klaten TA. 2003

PASAL	SEKTOR / SUB SEKTOR / PROGRAM / PROYEK	KETERANGAN (STANDAR BIAYA, TUJUAN, SASARAN, ,LOKASI)	JUMLAH DANA (Rp.)	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
		d. OW Deles Indah		
		- Rehab Panggung Terbuka 4 x 6 m	Rp. 15.000.000	
		- Rehab Gedung Ijo 12 m x 12 m	Rp. 20.000.000	
		e. OW Sendang Sinongko		
		- Pembuatan jalur jalan lingkar 3 x 200 m	Rp. 13.500.000	
		- Pengadaan mainan fiber 2 unit	Rp. 12.000.000	
		- Pembuatan gasebo 2 unit	Rp. 7.500.000	
		- Pembuatan portal/loket 1 unit 2x2 m	Rp. 7.500.000	
		f. OW Pemadidan Jolotundo		
		- Rehab Gapura Masuk 1 unit	Rp. 1.500.000	
		- Perkerasan halamnn paving 150 m ²	Rp. 7.500.000	
		- Peralatan loncat indah 2 unit	Rp. 5.497.500	
		g. OW Pemadidan Tirtomulyono		
		- Pembuatan Kamar Ganti 2 unit 2 x 2 m dan penataan lingkungan	Rp. 10.000.000	
		h. Penataan Taman di lokasi cilimbing di bukit Sidagura	Rp. 10.000.000	
		3. Administrasi Proyek	Rp. 8.431.500	
		Jumlah	Rp. 281.050.000	
		Setelah Perubahan		
		1. Persiapan	Rp. 5.621.000	
		2. Pelaksanaan:		
		a. OW Jombor Permai		
		- Rehab Jalan Naik 1.217 m ²	Rp. 27.200.000	
		- Penataan halaman panggung 405 m ²	Rp. 18.600.000	
		- Pembuatan tribun 45 m	Rp. 6.500.000	
		- Rehab panggung lama utk tamu VI 6 x 7 m	Rp. 13.500.000	
		b. OW Sendang Plampean		
		- Pemasangan besi pemisah jalur (1,5 m x 30 m)	Rp. 14.000.000	
		- Rehab pagar pengaman sendang 1 m x 20 m	Rp. 10.000.000	
		- Pembuatan saluran penguras sendang (1 m x 20 m)	Rp. 7.500.000	
		- Rehab Langgar Soran (3 x 3 m)	Rp. 12.500.000	
		c. OW Sumber Air Ingas		
		- Pemasangan Paving 2 m x 180 m	Rp. 13.000.000	
		- Penataan Taman bermain 70 m ² dan pengadaan mainan anak 4 macam	Rp. 34.200.000	

di awal 14 langsung



Perubahan Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Kab Klaten TA. 2003

PASAL	SEKTOR / SUB SEKTOR / PROGRAM / PROYEK	KETERANGAN (STANDAR BIAYA, TUJUAN, SASARAN, ,LOKASI)	JUMLAH DANA (Rp.)	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
		d. OW Deles Indah		
		- Rehab Panggung Terbuka 4 x 6 m	Rp. 15.000.000	
		- Rehab Gedung Ijo 12 m x 12 m	Rp. 20.000.000	
		e. OW Sendang Sinongko		
		- Pembuatan jalur jalan lingkar 3 x 200 m	Rp. 13.500.000	
		- Pengadaan mainan fiber 2 unit	Rp. 12.000.000	
		- Pembuatan gasebo 2 unit	Rp. 7.500.000	
		- Pembuatan portal/loket 1 unit 2x2 m	Rp. 7.500.000	
		- Jembatan sungai 2,5 x 4 m dan peta klaten 3 x 7 m	Rp. 14.000.000	
		f. OW Pemandian Jolotundo		
		- Rehab Gapura Masuk 1 unit	Rp. 1.500.000	
		- Perkerasan halamn paving 150 m ²	Rp. 7.500.000	
		- Peralatan loncat indah 2 unit	Rp. 5.497.500	
		g. OW Pemandian Tirtomulyono		
		- Pembuatan Kamar Ganti 2 unit 2 x 2 m dan penataan lingkungan	Rp. 10.000.000	
		h. Penataan Taman di lokasi climbing di bukit Sidagura 8 x 20 m	Rp. 10.000.000	
		3. Administrasi Proyek	Rp. 8.431.500	
		Jumlah	Rp. <u>295.050.000</u>	

B. Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana Obyek Wisata

C. Sasaran : 9 Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Klaten

D. Indikator Kinerja

a. Keluaran (Output) : Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di OW

b. Hasil (Outcomes) : Panataan / pembangunan sarana dan prsarana

c. Manfaat (Benefit) : Meningkatkan pengunjung

d. Dampak (Impact) : Meningkatkan PAD

E. Lokasi : - Desa Krakitan, Kec. Bayat
- Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom
- Desa Cokro, Kec. Tulung
- Desa Sidorejo, Kec. Kemalang
- Desa Pokak, Kec. Ceper
- Desa Jambeyan, Kec. Karanganyam
- Desa Pluneng Kec. Kebonarum
- Desa Palar, Kec. Trucuk
- Desa Krakitan, Kec. Bayat

F. Alasan Perubahan : Pemerataan kegiatan promosi pariwisata di Kabupaten Klaten

Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Kab Klaten TA. 2003

PABAL	SEKTOR / SUB SEKTOR / PROGRAM / PROYEK	KETERANGAN (STANDAR BIAYA, TUJUAN, SASARAN, ,LOKASI)	JUMLAH DANA (Rp.)	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
2P.0.6.1.02	002 Proyek Pendukung Revitalisasi Obyek Wisata Ronggo Warsito (Dana Daerah Lainnya / DDL)	<i>Tidak ada Perubahan Anggaran</i>		Kantor Pariwisata
2P.0.6.1.02	003 Proyek Penataan Obyek Wisata Pandanaran (Dana Daerah Lainnya / DDL)	<p>A. Standard Biaya</p> <p>A. Standard Biaya</p> <p>Semula Rp. 250.000.000</p> <p>Bertambah/Berkurang Rp. (75.000.000)</p> <p>Rp. 175.000.000</p> <p>Sebelum Perubahan</p> <p>1. Persiapan Rp. 3.375.000</p> <p>Survey dan Design</p> <p>2. Pelaksanaan:</p> <p>a. Penataan kios pariwisata bekas SD Rp. 100.000.000</p> <p>Paseban</p> <p>b. Rehab bangsal 10 x 10 m 140.000.000</p> <p>3. Administrasi Proyek Rp. 6.625.000</p> <p>Jumlah Rp. 250.000.000</p> <p>Setelah Perubahan</p> <p>1. Persiapan Rp. 2.250.000</p> <p>Survey dan Design</p> <p>2. Pelaksanaan:</p> <p>a. Pembuatan Master Plan OW Makam Rp. 18.000.000</p> <p>Pandanaran</p> <p>b. Rehab bangsal 10 x 10 m Rp. 150.000.000</p> <p>3. Administrasi Proyek Rp. 4.750.000</p> <p>Jumlah Rp. 175.000.000</p> <p>B. Tujuan : - Peningkatan sarana dan prasarana di OW - Peningkatan pendapatan masyarakat</p> <p>C. Sasaran : Meningkatkan pengunjung dan PAD</p> <p>D. Indikator Kinerja</p> <p>a. Keluaran (Output) : Terbangunnya perkioasan dan tertatanya lingkungan</p> <p>b. Hasil (Outcomes) : Pembangunan kios untuk memasarkan produk klaten</p> <p>c. Manfaat (Benefit) : Mempromosikan / memasarkan produk Kklaten</p> <p>d. Dampak (Impact) : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata</p> <p>E. Lokasi : Desa Paseban Kec. Bayat dan desa Melikan Kec. Wedi</p> <p>F. Alasan Perubahan : Skala prioritas master plan lebih dulu</p>	Rp. 175.000.000	Kantor Pariwisata

Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Kab Klaten I.A. 2003

PASAL	SEKTOR / SUB SEKTOR / PROGRAM / PROYEK	KETERANGAN (STANDAR BIAYA, TUJUAN, SASARAN, ,LOKASI)	JUMLAH DANA (Rp.)	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
		b. Bantuan penyelenggaraan Lomba tracking di Deles Indah / Goa Jepang	Rp. 3.000.000	
		c. Bantuan penyelenggaraan Lomba gerak jalan wisata (pager jawi)	Rp. 4.220.000	
		d. Bantuan penyelenggaraan Lomba burung di OW Kab. Klaten	Rp. 2.000.000	
		e. Bantuan penyelenggaraan Lomba Poco-poco di OW Kab. Klaten	Rp. 2.000.000	
		f. Bantuan penyelenggaraan Lomba Festival drumband pelajar di Alun-alun	Rp. 3.000.000	
		g. Bantuan penyelenggaraan Lomba Festival campursari di OW Deles Indah	Rp. 3.000.000	
		h. Bantuan penyelenggaraan Lomba Lomba lukis / mewarnai di OW Kab. Klaten	Rp. 3.000.000	
		i. Bantuan penyelenggaraan Lomba Pacuan Kuda di Lapangan Bendo Pedan	Rp. 2.000.000	
		3. Administrasi Proyek	Rp. 780.000,00	
		Jumlah	<u>Rp. 26.000.000</u>	

B. Tujuan : Menumbuhkan kreatifitas kelompok dan memperkenalkan OW

C. Sasaran : Meningkatkan kepariwisataan Kabupaten Klaten

D. Indikator Kinerja

a. Keluaran (Output) : Terselenggaranya lomba/festival di OW

b. Hasil (Outcomes) : Terlaksananya lomba / festival seni budaya dan olahraga di OW

c. Manfaat (Benefit) : Dikenalnya OW oleh masyarakat

d. Dampak (Impact) : Merangsang aktifitas kelompok seni budaya dan olahraga

E. Lokasi : OW se-Kabupaten Klaten

F. Alasan Perubahan : Pemerataan Kegiatan Promosi Pariwisata di Kabupaten Klaten

2P.0.6.1.04 Program Pengembangan Kerjasama Kepariwisataaan

2P.0.6.1.04	001	Proyek Kerjasama Pariwisata Antar Kabupaten (Dana Daerah Lainnya / DDL)	Tidak ada Perubahan Anggaran	Kantor Pariwisata
2P.0.6.1.04	002	Proyek Peningkatan dan Pengembangan Usaha Pariwisata (Dana Daerah Lainnya / DDL)	Tidak ada Perubahan Anggaran	Kantor Pariwisata
2P.0.6.1.04	003	Proyek Pendampingan Pembebasan Tanah Parit Candi Plaosan (Dana Daerah Lainnya / DDL)	Tidak ada Perubahan Anggaran	Kantor Pariwisata

PASAL	SEKTOR / SUB SEKTOR / PROGRAM / PROYEK	KETERANGAN (STANDAR BIAYA, TUJUAN, SASARAN, LOKASI)	JUMLAH DANA (Rp.)	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5

**2P.0.7. SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN**

2P.0.7.1. SUB SEKTOR PERTANIAN

2P.0.7.1.01. Program Pembangunan Pertanian Rakyat
Terpadu (P2RT)

2P.0.7.1.01. 001	Proyek	Penyusunan Perencanaan Teknis Bidang Pertanian. <i>(Dana Daerah Lainnya)</i>	A. Standard Biaya Sebelum Bertambah	Rp. 113,000,000 Rp. - <u>Rp. 113,000,000</u>	Rp. 113,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
------------------	--------	--	---	--	-----------------	--



**DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2004**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KANTOR PARIWISATA
Jl. Pemuda No. 230 ☎ (0272) 322405
KLATEN**

PERUBAHAN DAFTAR REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN					D 3		
SATUAN KERJA							
Tahun		: 2004					
Bidang Pemerintahan		: Pariwisata					
Satuan Kerja		: Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten					
KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN					
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)			
1	2	3	4	5			
1 20 01	PENDAPATAN	380.000.000,-	386.000.000,-	6.000.000,-			
1 20 01 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	380.000.000,-	386.000.000,-	6.000.000,-			
1 20 01 1 2	Retribusi Daerah	380.000.000,-	386.000.000,-	6.000.000,-			
1 20 01 1 2 12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	372.000.000,-	376.750.000,-	4.750.000,-			
1 20 01 1 2 12 01	Perayaan Padusan	11.500.000,-	11.500.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 02	Perayaan Maleman	15.000.000,-	15.000.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 03	Perayaan Syawalan	65.000.000,-	65.000.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 04	Perayaan Yaqowiyu	12.500.000,-	12.500.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 05	Deles Indah	15.500.000,-	15.500.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 06	Sumber Ingas	75.000.000,-	75.000.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 07	Makam Pandanaran	90.000.000,-	90.000.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 08	Jombor Permai	65.000.000,-	70.000.000,-	5.000.000,-			
1 20 01 1 2 12 09	Makam R.Ng. Ronggowarsito	500.000,-	500.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 10	Makam Perwito	100.000,-	100.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 11	Pemandian Jolotundo	13.800.000,-	13.800.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 12	Retribusi Janti	-	-	-			
1 20 01 1 2 12 13	Candi Plaosan	700.000,-	750.000,-	50.000,-			
1 20 01 1 2 12 14	Makam Ki Ageng Gribig	600.000,-	600.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 15	Pemandian Tirta Mulyono	300.000,-	-	(300.000,-)			
1 20 01 1 2 12 16	Bagian dari TWC Prambanan	-	-	-			
1 20 01 1 2 12 17	Sandang Sinongko	500.000,-	500.000,-	-			
1 20 01 1 2 12 18	Lain-lain	6.000.000,-	6.000.000,-	-			

1						2	3	4	5	
1	20	01	1	2	23		Retribusi Ijin Penyel.Bidang Kepariwisataan	8.000.000,-	9.250.000,-	1.250.000,-
1	20	01	1	2	22	01	Hotel	4.500.000,-	5.000.000,-	500.000,-
1	20	01	1	2	22	02	Rumah Makan	1.000.000,-	1.250.000,-	250.000,-
1	20	01	1	2	22	03	URHU	2.500.000,-	3.000.000,-	500.000,-
2	20	01					BELANJA	1.657.407.000,-	1.550.430.000,-	(106.977.000,-)
2	20	01				1	APARATUR DAERAH	1.007.238.000,-	923.757.000,-	(83.481.000,-)
2	20	01	1			1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	775.438.000,-	754.579.000,-	(20.859.000,-)
2	20	01	1	1		1	BELANJA PEGAWAI ①	644.553.000,-	623.694.000,-	(20.859.000,-)
2	20	01	1	1	03		Gaji dan Tunjangan Pegawai	643.286.000,-	622.427.000,-	(20.859.000,-)
2	20	01	1	1	03	01	Gaji Pokok	515.827.000,-	496.774.000,-	(19.053.000,-)
2	20	01	1	1	03	02	Tunjangan Keluarga	49.321.000,-	49.321.000,-	~
2	20	01	1	1	03	03	Tunjangan Jabatan	18.720.000,-	18.720.000,-	~
2	20	01	1	1	03	04	Tunjangan Fungsional	~	~	~
2	20	01	1	1	03	05	Tunjangan Kesejahteraan	~	~	~
2	20	01	1	1	03	06	Tunjangan Beras	41.525.000,-	39.719.000,-	(1.806.000,-)
2	20	01	1	1	03	07	Tunjangan PPh	17.872.000,-	17.872.000,-	~
2	20	01	1	1	03	08	Pembulatan	21.000,-	21.000,-	~
2	20	01	1	1	06		Asuransi	1.267.000,-	1.267.000,-	~
2	20	01	1	1	06	01	Asuransi	1.267.000,-	1.267.000,-	~
2	20	01	1	2		1	BELANJA BARANG DAN JASA ②	82.692.000,-	82.692.000,-	~
2	20	01	1	2	01		Biaya Bahan Habis Pakai Kantor	7.975.000,-	7.975.000,-	~
2	20	01	1	2	01	01	Biaya Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Kabel dll)	1.375.000,-	1.375.000,-	~
2	20	01	1	2	01	02	Biaya Alat Tulis	4.400.000,-	4.400.000,-	~
2	20	01	1	2	01	03	Biaya Perangko, Materai dan benda Pos lainnya	~	~	~
2	20	01	1	2	01	04	Biaya Alat Kebersihan	2.200.000,-	2.200.000,-	~

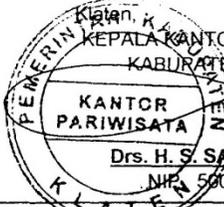
1							2							3	4	5
2	20	01	1	2	02	1	Biaya Jasa Kantor							62.930.000,-	62.930.000,-	-
2	20	01	1	2	02	01	Biaya Listrik							7.560.000,-	7.560.000,-	-
2	20	01	1	2	02	02	Biaya Telepon							6.420.000,-	6.420.000,-	-
2	20	01	1	2	02	03	Biaya Air							1.740.000,-	1.740.000,-	-
2	20	01	1	2	02	07	Biaya Jasa Pegawai Non PNS							47.210.000,-	47.210.000,-	-
2	20	01	1	2	03	1	Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor							10.287.000,-	10.287.000,-	-
2	20	01	1	2	03	01	Biaya Cetak							8.620.000,-	8.620.000,-	-
2	20	01	1	2	03	02	Fotokopi							1.667.000,-	1.667.000,-	-
2	20	01	1	2	05	1	Biaya Makanan dan Minuman Kantor							1.500.000,-	1.500.000,-	-
2	20	01	1	2	05	02	Biaya Makanan dan Minuman Rapat							1.000.000,-	1.000.000,-	-
2	20	01	1	2	05	03	Biaya Makanan dan Minuman Tamu							500.000,-	500.000,-	-
2	20	01	1	3		1	BELANJA PERJALANAN DINAS u							27.145.000,-	27.145.000,-	-
2	20	01	1	3	01	1	Biaya Perjalanan Dinas							27.145.000,-	27.145.000,-	-
2	20	01	1	3	01	01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah							11.458.000,-	11.458.000,-	-
2	20	01	1	3	01	02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah							15.687.000,-	15.687.000,-	-
2	20	01	1	4		1	BELANJA PEMELIHARAAN b							21.048.000,-	21.048.000,-	-
2	20	01	1	4	01	1	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung							16.379.000,-	16.379.000,-	-
2	20	01	1	4	01	01	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja							16.379.000,-	16.379.000,-	-
2	20	01	1	4	02	1	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan							2.084.000,-	2.084.000,-	-
2	20	01	1	4	02	01	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor							2.084.000,-	2.084.000,-	-
2	20	01	1	4	03	1	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga							2.585.000,-	2.585.000,-	-
2	20	01	1	4	03	01	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor							300.000,-	300.000,-	-
2	20	01	1	4	03	02	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga							700.000,-	700.000,-	-
2	20	01	1	4	03	03	Biaya Pemeliharaan Komputer							1.200.000,-	1.200.000,-	-
2	20	01	1	4	03	04	Biaya Pemeliharaan Meja dan Kursi							385.000,-	385.000,-	-

1						2	3	4	5
2	20	01	2		1	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	231.800.000,-	169.178.000,-	(62.622.000,-)
2	20	01	2	1		BELANJA PEGAWAI:	23.801.000,-	27.489.000,-	2.688.000,-
2	20	01	2	1	01	Honorarium/Upah	4.501.000,-	3.061.000,-	(1.440.000,-)
2	20	01	2	1	01 01	Honorarium Tim/Panitia	1.731.000,-	291.000,-	(1.440.000,-)
2	20	01	2	1	01 02	Honor/Upah Bulanan	1.950.000,-	1.950.000,-	~
2	20	01	2	1	01 03	Honor/Upah Harian	820.000,-	820.000,-	~
2	20	01	2	1	03	Insentif	19.300.000,-	24.428.000,-	5.128.000,-
2	20	01	2	1	03 01	Insentif Retribusi	19.300.000,-	24.428.000,-	5.128.000,-
2	20	01	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	204.461.000,-	139.336.000,-	(65.125.000,-)
2	20	01	2	2	01	Biaya Bahan/Material	409.000,-	409.000,-	~
2	20	01	2	2	01 05	Biaya Alat Tulis	409.000,-	409.000,-	~
2	20	01	2	2	02	Biaya Jasa Pihak Ketiga	187.633.000,-	122.146.000,-	(65.487.000,-)
2	20	01	2	2	02 02	Biaya Transportasi dan akomodasi	~	~	~
2	20	01	2	2	02 03	Biaya Dokumentasi	1.133.000,-	1.146.000,-	13.000,-
2	20	01	2	2	02 05	Biaya Konsultan, Pemborong, Perguruan Tinggi, Iuran	186.500.000,-	103.800.000,-	(82.700.000,-)
2	20	01	2	2	02 07	Biaya Penyelenggaraan Keg. Kepariwisata	~	17.200.000,-	17.200.000,-
2	20	01	2	2	03	Biaya Cetak dan Penggandaan	10.159.000,-	10.790.000,-	631.000,-
2	20	01	2	2	03 01	Biaya Cetak	8.604.000,-	9.235.000,-	631.000,-
2	20	01	2	2	03 02	Fotokopi	1.555.000,-	1.555.000,-	~
2	20	01	2	2	04	Biaya Sewa	1.775.000,-	1.775.000,-	~
2	20	01	2	2	04 01	Sewa Tempat	500.000,-	500.000,-	~
2	20	01	2	2	04 02	Sewa Alat	300.000,-	300.000,-	~
2	20	01	2	2	04 03	Sewa Perlengkapan	975.000,-	975.000,-	~
2	20	01	2	2	05	Biaya Makanan dan Minuman	4.485.000,-	4.216.000,-	(269.000,-)
2	20	01	2	2	05 01	Biaya Makanan dan Minuman Rapat	4.485.000,-	4.216.000,-	(269.000,-)

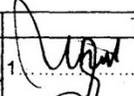
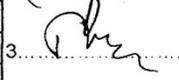
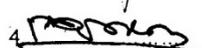
1							2							3	4	5
2	20	01	2	3		1	BELANJA PERJALANAN DINAS							3.538.000,-	2.353.000,-	(1.185.000,-)
2	20	01	2	3	01	1	Biaya Perjalanan Dinas							3.538.000,-	2.353.000,-	(1.185.000,-)
2	20	01	2	3	01	01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					~	~	~		
2	20	01	2	3	01	02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					3.538.000,-	2.353.000,-	(1.185.000,-)		
2	20	01				2	PELAYANAN PUBLIK							650.169.000,-	626.673.000,-	(23.496.000,-)
2	20	01	2			2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN							452.444.000,-	416.144.000,-	(36.300.000,-)
2	20	01	2	1		2	BELANJA PEGAWAI							12.955.000,-	12.955.000,-	~
2	20	01	2	1	01	2	Honorarium/Upah							12.955.000,-	12.955.000,-	~
2	20	01	2	1	01	01	Honorarium Tim/Panitia					3.125.000,-	3.125.000,-	~		
2	20	01	2	1	01	02	Honor/Upah Bulanan					8.510.000,-	8.510.000,-	~		
2	20	01	2	1	01	03	Honor/Upah Harian					1.320.000,-	1.320.000,-	~		
2	20	01	2	2		2	BELANJA BARANG DAN JASA							420.579.000,-	384.109.000,-	(36.470.000,-)
2	20	01	2	2	01	2	Biaya Bahan/Material							5.635.000,-	5.635.000,-	~
2	20	01	2	2	01	05	Biaya Alat Tulis					5.635.000,-	5.635.000,-	~		
2	20	01	2	2	02	2	Biaya Jasa Pihak Ketiga							354.077.000,-	313.907.000,-	(40.170.000,-)
2	20	01	2	2	02	02	Biaya Transportasi dan Akomodasi					7.996.000,-	13.610.000,-	5.620.000,-		
2	20	01	2	2	02	03	Biaya Dokumentasi					5.268.000,-	5.378.000,-	110.000,-		
2	20	01	2	2	02	04	Biaya Dekorasi					11.500.000,-	11.500.000,-	~		
2	20	01	2	2	02	05	Biaya Konsultan, Pemborong, Perguruan Tinggi, Iuran					289.000.000,-	241.500.000,-	(47.500.000,-)		
2	20	01	2	2	02	07	Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Kepariwisata					40.319.000,-	41.919.000,-	1.600.000,-		
2	20	01	2	2	03	2	Biaya Cetak dan Penggandaan							24.117.000,-	24.117.000,-	~
2	20	01	2	2	03	01	Biaya Cetak					20.900.000,-	20.900.000,-	~		
2	20	01	2	2	03	02	Fotokopi					3.217.000,-	3.217.000,-	~		

1						2	3	4	5	
2	20	01	2	2	04	2	Biaya Sewa	19.526.000,-	23.226.000,-	3.700.000,-
2	20	01	2	2	04	01	Biaya Sewa Tempat	13.700.000,-	17.400.000,-	3.700.000,-
2	20	01	2	2	04	02	Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkutan	1.580.000,-	1.580.000,-	-
2	20	01	2	2	04	03	Biaya Sewa Perlengkapan	4.246.000,-	4.246.000,-	-
2	20	01	2	2	05	2	Biaya Makanan dan Minuman	17.224.000,-	17.224.000,-	-
2	20	01	2	2	05	01	Biaya Makanan dan Minuman Rapat	17.224.000,-	17.224.000,-	-
2	20	01	2	3		2	BELANJA PERJALANAN DINAS	18.910.000,-	19.080.000,-	170.000,-
2	20	01	2	3	01	2	Biaya Perjalanan Dinas	18.910.000,-	19.080.000,-	170.000,-
2	20	01	2	3	01	01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.918.000,-	3.918.000,-	-
2	20	01	2	3	01	02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.992.000,-	15.162.000,-	170.000,-
2	20	01	4			2	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	197.725.000,-	210.529.000,-	12.804.000,-
2	20	01	4	2		2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepala Desa/Kel.	147.725.000,-	159.029.000,-	11.304.000,-
2	20	01	4	2	01	02	Bagi Hasil Pengelolaan Keg 12 Obyek Wisata	147.725.000,-	159.029.000,-	11.304.000,-
							a. Deles Indah	-	1.850.000,-	1.850.000,-
							b. Sumber Air Ingas	-	5.959.000,-	5.959.000,-
							c. Jombor Permai	-	875.000,-	875.000,-
							d. Makam Pandanaran	-	1.436.000,-	1.436.000,-
							e. Candi Plaosan KA Perwito	-	24.000,-	24.000,-
							f. Makam Ronggo Warsito	-	60.000,-	60.000,-
							g. Makam Ki Ageng Gribig	-	300.000,-	300.000,-
							h. Jolotundo	-	800.000,-	800.000,-
							i. Bagi Hasil 2004	147.725.000,-	147.725.000,-	-
2	20	01	4	5		2	Bantuan Keuangan kepada Org. Kemasyarakatan	50.000.000,-	51.500.000,-	1.500.000,-
2	20	01	4	5	04	01	Bantuan Keuangan untuk Penyel. Keg. Pariwisata	50.000.000,-	51.500.000,-	1.500.000,-
							a. Paguyuban Pengamen (DEKAP)	-	4.000.000,-	-
							b. Forum Masyarakat Pariwisata	-	7.500.000,-	-
							c. Penyel. Lomba Panjat Tebing/Dinding di OW	-	2.500.000,-	-
							d. Penyel. Lomba Lintas Alam di OW	-	2.500.000,-	-

1	2	3	4	5
	e. Penyel. Gerak Jalan Wisata (PAGERJAWI)	~	5.000.000,-	~
	f. Pameran Bonsai Nasional	~	750.000,-	~
	g. Penyelenggaraan Lomba Burung	~	2.000.000,-	~
	h. Penyelenggaraan Poco-Poco di OW	~	2.500.000,-	~
	i. Penyelenggaraan Lomba Campursari di OW	~	2.500.000,-	~
	j. Penyelenggaraan Lomba/Festifal Band	~	1.500.000,-	~
	k. Penyelenggaraan Lomba Lukis/Mewarnai di OW	~	2.500.000,-	~
	l. Penyelenggaraan Lomba Pacuan Kuda Tradisi	~	2.000.000,-	~
	m. Penyelenggaraan Lomba Cheer Leaders di OW	~	2.000.000,-	~
	n. Penyelenggaraan Drum Band di OW	~	2.500.000,-	~
	o. Pembelian Tropy dan Piala	~	1.750.000,-	~
	p. Penyel. Dharma wisata Naka Sekolah Tak Mampu	~	5.000.000,-	~
	q. Penyelenggaraan Lomba Dolanan Anak	~	2.000.000,-	~
	r. Biaya Administrasi	~	1.500.000,-	~
	s. Pembin. & pengiriman Pokdarwis Tk. Bakorlin	~	1.500.000,-	~

Klaten, Klaten 2005
 KEPALA KANTOR PARIWISATA
 KABUPATEN KLATEN

 KANTOR
 PARIWISATA
 Drs. H. S. SAPTOAJI, MM
 NIP. 500 082 360

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

NO	N A M A	NIP	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1	Ir. Riyo Darmanto	500071938	Kepala Bapeda	1. 
2	Drs. H. Indarwanto	010172228	Kepala BPKD	2. 
3	Drs. Hadi Purnomo, Msi	010166137	Kepala Dipenda	3. 
4	Drs. Purwanto AC, Msi	500082414	Kepala Bagian Pembangunan	4. 

Satuan PK¹¹⁹
23/5/05



**DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2005**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KANTOR PARIWISATA
Jl. Pemuda No. 230 ☎ (0272) 322405
KLATEN**

DAFTAR REKAPITULASI ANGGARAN SATUAN KERJA		D3
Tahun	2005	
Bidang Pemerintahan	Pariwisata	
Satuan Kerja	Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN	430.500.000,-
20	BIDANG PEMERINTAHAN	
01	KANTOR PARIWISATA KABUPATEN KLATEN	
1 20 01 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	430.500.000,-
1 20 01 1 2	RETRIBUSI DAERAH	430.500.000,-
1 20 01 1 2 12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	419.500.000,-
1 20 01 1 2 12 01	Perayaan Padusan	13.500.000,-
1 20 01 1 2 12 02	Perayaan Maleman	16.500.000,-
1 20 01 1 2 12 03	Perayaan Syawalan	70.000.000,-
1 20 01 1 2 12 04	Perayaan Yaqowiyu	12.500.000,-
1 20 01 1 2 12 05	Deles Indah	16.500.000,-
1 20 01 1 2 12 06	Sumber Ingas	84.000.000,-
1 20 01 1 2 12 07	Makam Pandanaran	96.000.000,-
1 20 01 1 2 12 08	Jombor Permai	75.000.000,-
1 20 01 1 2 12 09	Makam R.Ng.Ronggowarsito	1.000.000,-
1 20 01 1 2 12 10	Makam Perwito	250.000,-
1 20 01 1 2 12 11	Pemandian Jolotundo	16.000.000,-
1 20 01 1 2 12 12	Candi Plaosan	1.500.000,-
1 20 01 1 2 12 13	Makam KI Ageng Gribig	700.000,-
1 20 01 1 2 12 14	Pemandian Tirta Mulyono	0,-
1 20 01 1 2 12 15	Sendang Sinongko	500.000,-
1 20 01 1 2 12 16	Lain-lain	15.550.000,-
1 20 01 1 2 24	Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bid.kepariwistaan	11.000.000,-
1 20 01 1 2 24 01	Hotel	6.000.000,-
1 20 01 1 2 24 02	Rumah Makan	1.500.000,-
1 20 01 1 2 24 03	URHU	3.500.000,-
2	BELANJA	1.790.560.000,-
1	APARATUR DAERAH	1.057.686.000,-
2 20 01 1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	797.417.000,-
2 20 01 1 1	BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA	656.503.000,-
2 20 01 1 1 03	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	637.955.000,-
2 20 01 1 1 03 01	~ Gaji Pokok	511.602.000,-
2 20 01 1 1 03 02	~ Tunjangan Keluarga	51.573.000,-
2 20 01 1 1 03 03	~ Tunjangan Jabatan	20.280.000,-
2 20 01 1 1 03 06	~ Tunjangan Beras	39.719.000,-
2 20 01 1 1 03 07	~ Tunjangan PPH	14.759.000,-
2 20 01 1 1 03 08	~ Pembulatan	22.000,-

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)
2	20	01	1	1	06		1	Asuransi	5.068.000,-
2	20	01	1	1	06	01	1	Asuransi	
2	20	01	1	1	08		1	Honorarium / Upah Bulanan	11.400.000,-
2	20	01	1	1	08	01	1	Honorarium Bulanan Pengguna Anggaran	1.200.000,-
2	20	01	1	1	08	03	1	Honorarium Bulanan Pemimpin Kegiatan	3.840.000,-
2	20	01	1	1	08	04	1	Honorarium Bulanan Pemegang Kas	960.000,-
2	20	01	1	1	08	05	1	Honorarium Bulanan Pembantu Pemegang Kas	5.400.000,-
2	20	01	1	1	08	06	1	Honorarium Bulanan Pemegang Barang	-
2	20	01	1	1	09		1	Uang Lembur	2.080.000,-
2	20	01	1	1	09	01	1	Uang Lembur Harian Lepas	2.080.000,-
2	20	01	1	2			1	BELANJA BARANG DAN JASA (2)	100.706.000,-
2	20	01	1	2	01		1	Biaya Bahan Habis Pakai Kantor	6.250.000,-
2	20	01	1	2	01	01	1	Biaya alat listrik & Elektronik	875.000,-
2	20	01	1	2	01	02	1	Biaya Alat Tulis	3.375.000,-
2	20	01	1	2	01	04	1	Biaya Peralatan Kebersihan	2.000.000,-
2	20	01	1	2	02		1	Biaya Jasa Kantor	81.669.000,-
2	20	01	1	2	02	01	1	Biaya Langganan Listrik	7.560.000,-
2	20	01	1	2	02	02	1	Biaya Langganan Telepon	6.420.000,-
2	20	01	1	2	02	03	1	Biaya Air	1.740.000,-
2	20	01	1	2	02	07	1	Biaya Jasa Pegawai non PNS (Tenaga Kontrak)	65.949.000,-
2	20	01	1	2	03		1	Biaya Cetak & Pengandaan Keperluan Kantor	11.287.000,-
2	20	01	1	2	03	01	1	~ Biaya Cetak	8.620.000,-
2	20	01	1	2	03	02	1	~ Biaya Foto Copy	2.667.000,-
2	20	01	1	2	05		1	Biaya Makanan dan Minuman Kantor	1.500.000,-
2	20	01	1	2	05	02	1	Biaya Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,-
2	20	01	1	2	05	03	1	Biaya Makanan dan Minuman Tamu	500.000,-
2	20	01	1	3			1	BELANJA PERJALANAN DINAS (4)	22.360.000,-
2	20	01	1	3	01		1	Biaya Perjalanan Dinas	22.360.000,-
2	20	01	1	3	01	01	1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.976.000,-
2	20	01	1	3	01	02	1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.384.000,-
2	20	01	1	4			1	BELANJA PEMELIHARAAN (3)	17.848.000,-
2	20	01	1	4	01		1	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	13.179.000,-
2	20	01	1	4	01	01	1	Biaya Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	13.179.000,-
2	20	01	1	4	02		1	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	2.084.000,-
2	20	01	1	4	02	01	1	Biaya Pemeliharaan Alat Angk Darat Bermotor	2.084.000,-
2	20	01	1	4	03		1	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor & Rumahtangga	2.585.000,-
2	20	01	1	4	03	01	1	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor	300.000,-
2	20	01	1	4	03	02	1	Biaya Pemeliharaan alat rumahtangga	700.000,-
2	20	01	1	4	03	03	1	Biaya Pemeliharaan Computer	1.200.000,-
2	20	01	1	4	03	04	1	Biaya Pemeliharaan Meja & Kursi	385.000,-
2	20	01	2				1	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	260.269.000,-
2	20	01	2	1			1	BELANJA PEGAWAI	26.644.000,-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
2 20 01 2 1 03	Inentif	23.360.000,-
2 20 01 2 1 03 01 1	Inentif Pendapatan	23.360.000,-
2 20 01 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	230.914.000,-
2 20 01 2 2 01	Biaya Bahan / Material	209.000,-
2 20 01 2 2 01 05 1	Biaya Alat Tulis Kantor	209.000,-
2 20 01 2 2 02	Biaya Jasa Pihak Ketiga	210.970.000,-
2 20 01 2 2 02 03 1	Biaya Dokumentasi	2.270.000,-
2 20 01 2 2 02 05 1	Biaya Konsultan, Pemborong, PT, Iuran	208.700.000,-
2 20 01 2 2 03	Biaya Cetak dan Penggandaan	17.325.000,-
2 20 01 2 2 03 01 1	Biaya Cetak	16.250.000,-
2 20 01 2 2 03 02 1	Biaya Foto copy	1.075.000,-
2 20 01 2 2 04	Biaya Sewa	
2 20 01 2 2 04 01 1	Sewa Tempat	
2 20 01 2 2 04 02 1	Sewa Alat	
2 20 01 2 2 04 03 1	Sewa Perlengkapan	
2 20 01 2 2 05	Biaya Makanan dan Minuman	2.410.000,-
2 20 01 2 2 05 02 1	Biaya Makan dan Minum Kegiatan	2.410.000,-
2 20 01 2 3	BELANJA PERJALANAN DINAS	2.711.000,-
2 20 01 2 3 01	Biaya Perjalanan Dinas	2.711.000,-
2 20 01 2 3 01 01 1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
2 20 01 2 3 01 02 1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.711.000,-
2 20 01	PELAYANAN PUBLIK	732.874.000,-
2 20 01 2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	554.659.000,-
2 20 01 2 1	BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA	17.421.000,-
2 20 01 2 1 01	HONORARIUM / UPAH	17.421.000,-
2 20 01 2 1 01 01 2	Honorarium Tim / Panitia	5.796.000,-
2 20 01 2 1 01 02 2	Honorarium bulanan	5.880.000,-
2 20 01 2 1 01 03 2	Honorarium harian	5.754.000,-
2 20 01 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	518.065.000,-
2 20 01 2 2 01	Biaya Bahan / Material	4.768.000,-
2 20 01 2 2 01 05 2	Biaya Alat Tulis	4.768.000,-
2 20 01 2 2 02	Biaya Jasa Pihak Ketiga	436.974.000,-
2 20 01 2 2 02 02 2	Biaya Transportasi dan Akomodasi	15.895.000,-
2 20 01 2 2 02 03 2	Biaya Dokumentasi	14.248.000,-
2 20 01 2 2 02 04 2	Biaya Dekorasi	19.800.000,-
2 20 01 2 2 02 05 2	Biaya Konsultan, Pemborong, PT, Iuran	348.031.000,-
2 20 01 2 2 02 07 2	Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Kepariwisata	39.000.000,-
2 20 01 2 2 03	Biaya Cetak dan Penggandaan	23.781.000,-
2 20 01 2 2 03 01 2	Biaya Cetak	20.550.000,-
2 20 01 2 2 03 02 2	Biaya Foto Copy / Penggandaan	3.231.000,-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
2 20 01 2 2 05	Biaya Makanan dan Minuman	24.092.000,-
2 20 01 2 2 05 01	Biaya Makan dan Minum Rapat	11.802.000,-
2 20 01 2 2 05 02	Biaya Makan dan Minum Kegiatan	12.290.000,-
2 20 01 2 3	BELANJA PERJALANAN DINAS	19.173.000,-
2 20 01 2 3 01	Biaya Perjalanan Dinas	19.173.000,-
2 20 01 2 3 01 01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.266.000,-
2 20 01 2 3 01 02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.907.000,-
2 20 01 4	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	178.215.000,-
2 20 01 4 2	Belanja bagi hasil retribusi kepala desa/kelurahan	90.915.000,-
2 20 01 4 2 01 02	Bagi Hasil Pengelolaan Kegiatan Obyek Wisata	90.915.000,-
2 20 01 4 5	Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	87.300.000,-
2 20 01 4 5 04 01 2	Bantuan Keuangan utk Penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata	87.300.000,-

Klaten,

2005

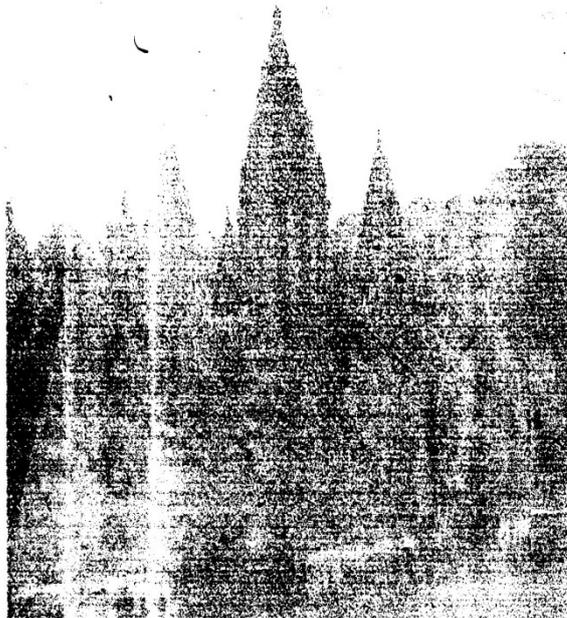
KANTOR PARIWISATA
KABUPATEN KLATEN
KANTOR
PARIWISATA
Drs. H. SUGIHARJO SAPTOAJI, MM
500082360

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Riyo Daimanto	500071938	Kepala BAPEDA	
2	Drs. H. Indarwanto	010172288	Kepala B P K D	
3.	Drs. Hadi Purnomo,MSi	010166137	Ka.Dipenda	
4.	Drs. Purwanto AC,MSi	500082414	Ka.Bag.Pembangunan	



**DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2006**



**PÉMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KANTOR PARIWISATA
Jl. Pemuda No. 230 ☎ (0272) 322405
KLATEN**

DOKUMEN REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN				D 3	
SATUAN KERJA					
Tahun	: 2006				
Bidang Pemerintahan	: Pariwisata				
Satuan Kerja	: Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten				
Kode Rekening	URAIAN	Jml. Anggaran sebelum Perubahan	Jml. Anggaran setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1	2	3	4	5	
1	PENDAPATAN	467,500,000	411,010,000	(56,490,000)	
20	BIDANG PARIWISATA				
0100	KANTOR PARIWISATA KABUPATEN KLATEN				
1 20 0100 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	467,500,000	411,010,000	(56,490,000)	
1 20 0100 1	RETRIBUSI DAERAH	467,500,000	411,010,000	(56,490,000)	
1 20 0100 1 02 12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	452,500,000	400,000,000	(52,500,000)	
1 20 0100 1 02 12 01	Perayaan Padusan	15,500,000	15,500,000	0	
1 20 0100 1 02 12 02	Perayaan Maleman	18,000,000	18,000,000	0	
1 20 0100 1 02 12 03	Perayaan Syawalan	75,000,000	75,000,000	0	
1 20 0100 1 02 12 04	Perayaan Yaqowiyu	15,000,000	15,000,000	0	
1 20 0100 1 02 12 05	Deles Indah	16,500,000	8,250,000	(8,250,000)	
1 20 0100 1 02 12 06	Sumber Ingas	92,000,000	92,000,000	0	
1 20 0100 1 02 12 07	Makam Pandanaran	100,000,000	70,000,000	(30,000,000)	
1 20 0100 1 02 12 08	Jombor Permai	82,000,000	65,600,000	(16,400,000)	
1 20 0100 1 02 12 09	Makam R.Ng.Ronggowarsito	1,000,000	1,000,000	0	
1 20 0100 1 02 12 10	Makam Perwito	250,000	250,000	0	
1 20 0100 1 02 12 11	Pemandian Jolotundo	17,000,000	17,000,000	0	
1 20 0100 1 02 12 12	Candi Plaosan	2,000,000	1,400,000	(600,000)	
1 20 0100 1 02 12 13	Makam KI Ageng Gribig	1,000,000	1,000,000	0	
1 20 0100 1 02 12 14	Sendang Sinongko	500,000	500,000	0	
1 20 0100 1 02 12 99	Lain-lain	16,750,000	19,500,000	2,750,000	
1 20 0100 1 02 24	Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bid Kepariwisataaan	15,000,000	11,010,000	(3,990,000)	
1 20 0100 1 02 24 01	Hotel	7,750,000	5,010,000	(2,740,000)	
1 20 0100 1 02 24 02	Rumah Makan	1,000,000	1,000,000	0	
1 20 0100 1 02 24 03	URHU	6,250,000	5,000,000	(1,250,000)	

1	2	3	4	5
2 20 0100	BELANJA	2,530,085,000	2,314,947,000	(215,138,000)
2 20 0100	APARATUR DAERAH	1,358,885,000	1,417,747,000	58,862,000
2 20 0100 1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	1,030,885,000	1,075,747,000	44,862,000
2 20 0100 1 01	BELANJA PEGAWAI	834,691,000	875,236,000	40,545,000
2 20 0100 1 01 03	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	787,799,000	827,927,000	40,128,000
2 20 0100 1 01 03 01	~ Gaji Pokok	584,107,000	612,008,000	27,901,000
2 20 0100 1 01 03 02	~ Tunjangan Keluarga	50,044,000	49,977,000	(67,000)
2 20 0100 1 01 03 03	~ Tunjangan Jabatan	30,420,000	28,860,000	(1,560,000)
2 20 0100 1 01 03 04	~ Tunjangan Fungsional	0	0	0
2 20 0100 1 01 03 05	~ Tunjangan Umum	69,225,000	68,325,000	(900,000)
2 20 0100 1 01 03 06	~ Tunjangan Beras	33,581,000	44,940,000	11,359,000
2 20 0100 1 01 03 07	~ Tunjangan PPH	20,404,000	23,793,000	3,389,000
2 20 0100 1 01 03 08	~ Pembulatan	18,000	24,000	6,000
2 20 0100 1 01 06	ASURANSI KESEHATAN	9,512,000	9,929,000	417,000
2 20 0100 1 01 06 01	Asuransi Kesehatan	9,512,000	9,929,000	417,000
2 20 0100 1 01 08	Biaya Kesejahteraan Pegawai	35,100,000	35,100,000	0
2 20 0100 1 01 08 01	Biaya Kesejahteraan Pengguna Anggaran	2,400,000	2,400,000	0
2 20 0100 1 01 08 03	Biaya Kesejahteraan Pemimpin Kegiatan	7,200,000	7,200,000	0
2 20 0100 1 01 08 04	Biaya Kesejahteraan Pemegang Kas	1,200,000	1,200,000	0
2 20 0100 1 01 08 05	Biaya Kesejahteraan Pembantu Pemegang Kas	5,400,000	5,400,000	0
2 20 0100 1 01 08 06	Biaya Kesejahteraan Pemegang Barang	900,000	900,000	0
2 20 0100 1 01 08 09	Biaya Kesejahteraan Pengurus Barang	600,000	600,000	0
2 20 0100 1 01 08 10	Biaya Kesejahteraan PNS	17,400,000	17,400,000	0
2 20 0100 1 01 09	Uang Lembur	2,280,000	2,280,000	0
2 20 0100 1 01 09 02	Uang Lembur Harian	2,280,000	2,280,000	0
2 20 0100 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	152,935,000	155,552,000	2,617,000
2 20 0100 1 02 01	Biaya Bahan Habis Pakai Kantor	11,277,000	11,277,000	0
2 20 0100 1 02 01 01	Biaya Alat Listrik & Elektronik	2,875,000	2,875,000	0
2 20 0100 1 02 01 02	Biaya Alat Tulis	5,545,000	5,545,000	0
2 20 0100 1 02 01 04	Biaya Alat Kebersihan	2,857,000	2,857,000	0

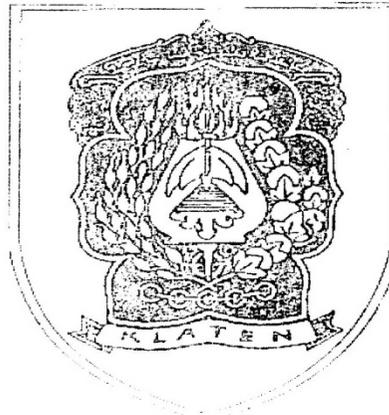
1	2	3	4	5
2 20 0100 1 02 02	1 Biaya Jasa Kantor	117,861,000	120,478,000	2,617,000
2 20 0100 1 02 02 01	1 Biaya Langganan Listrik	8,132,000	8,132,000	0
2 20 0100 1 02 02 02	1 Biaya Langganan Telepon	8,872,000	8,872,000	0
2 20 0100 1 02 02 03	1 Biaya Air	6,162,000	6,162,000	0
2 20 0100 1 02 02 07	1 Biaya Jasa Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak)	94,695,000	97,312,000	2,617,000
2 20 0100 1 02 03	1 Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor	12,262,000	12,262,000	0
2 20 0100 1 02 03 01	1 Biaya Cetak	7,545,000	7,545,000	0
2 20 0100 1 02 03 02	1 Biaya Foto Copy	4,717,000	4,717,000	0
2 20 0100 1 02 04	1 Biaya Sewa	2,000,000	2,000,000	0
2 20 0100 1 02 04 04	1 Biaya Sewa Perlengkapan Kantor	2,000,000	2,000,000	0
2 20 0100 1 02 05	1 Biaya Makanan dan Minuman Kantor	9,535,000	9,535,000	0
2 20 0100 1 02 05 02	1 Biaya Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000	1,200,000	0
2 20 0100 1 02 05 03	1 Biaya Makanan dan Minuman Tamu	8,335,000	8,335,000	0
2 20 0100 1 03	BELANJA PERJALANAN DINAS	26,678,000	27,718,000	1,040,000
2 20 0100 1 03 01	1 Biaya Perjalanan Dinas	26,678,000	27,718,000	1,040,000
2 20 0100 1 03 01 01	1 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,328,000	11,328,000	0
2 20 0100 1 03 01 02	1 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,350,000	16,390,000	1,040,000
2 20 0100 1 04	BELANJA PEMELIHARAAN	16,581,000	17,241,000	660,000
2 20 0100 1 04 05	1 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	11,912,000	11,912,000	0
2 20 0100 1 04 05 01	1 Biaya Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	11,912,000	11,912,000	0
2 20 0100 1 04 08	1 Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	2,084,000	2,744,000	660,000
2 20 0100 1 04 08 01	1 Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2,084,000	2,744,000	660,000
2 20 0100 1 04 11	1 Biaya Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah tangga	2,585,000	2,585,000	0
2 20 0100 1 04 11 01	1 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor	300,000	300,000	0
2 20 0100 1 04 11 02	1 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Rumah tangga	700,000	700,000	0
2 20 0100 1 04 11 03	1 Biaya Pemeliharaan Komputer	1,200,000	1,200,000	0
2 20 0100 1 04 11 04	1 Biaya Pemeliharaan Meja & Kursi	385,000	385,000	0

							3	4	5	
2	20	0100	2			1	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	328,000,000	328,000,000	0
2	20	0100	2	01		1	BELANJA PEGAWAI	13,387,000	15,019,000	1,632,000
2	20	0100	2	01	01	1	Honorarium / Upah	13,387,000	15,019,000	1,632,000
2	20	0100	2	01	01	01	Honorarium Tim Teknis / Panitia	13,137,000	14,769,000	1,632,000
2	20	0100	2	01	01	02	Honor / Upah Bulanan	250,000	250,000	0
2	20	0100	2	01	01	03	Honor / Upah Harian	0		
2	20	0100	2	02		1	BELANJA BARANG DAN JASA	309,616,000	309,069,000	(547,000)
2	20	0100	2	02	01	1	Biaya Bahan / Material	209,000	1,150,000	941,000
2	20	0100	2	02	01	05	Biaya Alat Tulis Kantor	209,000	0	(209,000)
2	20	0100	2	02	01	25	Biaya Pengumuman ke Media Massa	0	1,150,000	1,150,000
2	20	0100	2	02	02	1	Biaya Jasa Pihak Ketiga)	300,350,000	301,750,000	1,400,000
2	20	0100	2	02	02	03	Biaya Dokumentasi	0		
2	20	0100	2	02	02	05	Biaya Konsultn/Kemitraan/PT/LSM/Rekanan	300,350,000	301,750,000	1,400,000
2	20	0100	2	02	03	1	Biaya Cetak dan Pengandaan	1,350,000	1,365,000	15,000
2	20	0100	2	02	03	01	Biaya Cetak	0		
2	20	0100	2	02	03	02	Biaya Foto Copy	1,350,000	1,365,000	15,000
2	20	0100	2	02	05	1	Biaya Makanan dan Minuman	7,707,000	4,804,000	(2,903,000)
2	20	0100	2	02	05	02	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	7,707,000	4,804,000	(2,903,000)
2	20	0100	2	03		1	BELANJA PERJALANAN DINAS	4,997,000	3,912,000	(1,085,000)
2	20	0100	2	03	01	1	Biaya Perjalanan Dinas	4,997,000	3,912,000	(1,085,000)
2	20	0100	2	03	01	01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,072,000	3,072,000	0
2	20	0100	2	02	01	02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,925,000	840,000	(1,085,000)
2	20	0100	3			1	BELANJA MODAL	0	14,000,000	14,000,000
2	20	0100	3	12		1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah	0	14,000,000	14,000,000
2	20	0100	3	12	03	1	Belanja Modal Alat Kantor	0	14,000,000	14,000,000
2	20	0100	3	12	03	01	Belanja Modal Komputer	0	14,000,000	14,000,000

1							2	3	4	5
2	20	0100					2 PELAYANAN PUBLIK	1,171,200,000	897,200,000	(274,000,000)
2	20	0100	2				2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	831,200,000	779,700,000	(51,500,000)
2	20	0100	2	01			2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA	17,787,000	16,608,000	(1,179,000)
2	20	0100	2	01	01		2 Honorarium / Upah	17,787,000	16,608,000	(1,179,000)
2	20	0100	2	01	01	01	2 Honorarium Tim / Panitia	1,989,000	1,710,000	(279,000)
2	20	0100	2	01	01	02	2 Honor / Upah Bulanan	6,683,000	5,783,000	(800,000)
2	20	0100	2	01	01	03	2 Honor / Upah Harian	9,115,000	9,115,000	0
2	20	0100	2	02			2 BELANJA BARANG DAN JASA	805,756,000	755,525,000	(50,231,000)
2	20	0100	2	02	01		2 Biaya Bahan / Material	9,816,000	7,460,000	(2,356,000)
2	20	0100	2	02	01	05	2 Biaya Alat Tulis	9,816,000	7,460,000	(2,356,000)
2	20	0100	2	02	02		2 Biaya Jasa Pihak Ketiga	690,668,000	643,168,000	(47,500,000)
2	20	0100	2	02	02	02	2 Biaya Transportasi dan Akomodasi	19,780,000	19,780,000	0
2	20	0100	2	02	02	03	2 Biaya Dokumentasi	19,865,000	19,865,000	0
2	20	0100	2	02	02	04	2 Biaya Dekorasi	21,000,000	21,000,000	0
2	20	0100	2	02	02	05	2 Biaya Konsultn/Kemitraan/PT/LSM/Rekanan	552,650,000	505,150,000	(47,500,000)
2	20	0100	2	02	02	30	2 Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Kepariwisataaan	77,373,000	77,373,000	0
2	20	0100	2	02	03		2 Biaya Cetak dan Penggandaan	43,730,000	43,355,000	(375,000)
2	20	0100	2	02	03	01	2 Biaya Cetak	40,060,000	40,060,000	0
2	20	0100	2	02	03	02	2 Biaya Foto Copy/Penggandaan	3,670,000	3,295,000	(375,000)
2	20	0100	2	02	04		2 Biaya Sewa	36,074,000	36,074,000	0
2	20	0100	2	02	04	01	2 Biaya Sewa Tempat	29,050,000	29,050,000	0
2	20	0100	2	02	04	02	2 Biaya Sewa Peralatan	0	0	0
2	20	0100	2	02	04	03	2 Biaya Sewa Perlengkapan	7,024,000	7,024,000	0
2	20	0100	2	02	05		2 Biaya Makanan dan Minuman	25,468,000	25,468,000	0
2	20	0100	2	02	05	03	2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat	669,000	669,000	0
2	20	0100	2	02	05	02	2 Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	24,799,000	24,799,000	0

1							2	3	4	5
2	20	0100	2	03		2	BELANJA PERJALANAN DINAS	7,657,000	7,567,000	(90,000)
2	20	0100	2	03	01	2	<i>Biaya Perjalanan Dinas</i>	7,657,000	7,567,000	(90,000)
2	20	0100	2	03	01	01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,370,000	5,280,000	(90,000)
2	20	0100	2	03	01	02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,287,000	2,287,000	0
2	20	0100	3			2	BELANJA MODAL	340,000,000	117,500,000	(222,500,000)
2	20	0100	3	01		2	Belanja Modal Tanah	340,000,000	117,500,000	(222,500,000)
2	20	0100	3	01	13	2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan	340,000,000	117,500,000	(222,500,000)
2	20	0100	3	01	13	01	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan bkn Gedung	340,000,000	117,500,000	(222,500,000)
										158,648,000

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2007**



**KANTOR PARIWISATA
KABUPATEN KLATEN
Jalan Pemuda No. 230 Telp. (0272) 322405
K L A T E N**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
DPPA -SKPD

Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2007

Urusan Pemerintah : 2.04. Pariwisata
Organisasi : 2.04.01. Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN	437,000,000	435,300,000	(1,700,000)	(0.39)
4 1 2	Retribusi Tempat Rekreasi & OW	437,000,000	435,300,000	(1,700,000)	(0.39)
	BELANJA	3,385,805,000	5,629,338,000	2,243,533,000	66.26
5 1	Belanja Tidak Langsung	823,516,000	931,106,000	107,590,000	13.06
5 2	Belanja Langsung	2,562,289,000	4,698,232,000	2,135,943,000	83.36
5 2 1	- Belanja Pegawai	169,295,000	179,998,000	10,703,000	6.32
5 2 2	- Belanja Barang dan Jasa	1,311,869,000	1,381,277,000	69,408,000	5.29
5 2 3	- Belanja Modal	1,081,125,000	3,136,957,000	2,055,832,000	190.16
	Surplus/ (Defisit)	(2,948,805,000)	(5,194,038,000)	(2,245,233,000)	76.14
	Pembiayaan Penerimaan	0	0	0	0
6	Pembiayaan Pengeluaran	67,408,000	67,408,000	0	0
	Pembiayaan Netto	(67,408,000)	(67,408,000)	0	0

**Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

No.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Pendapatan	65,550,000	131,100,000	131,100,000	107,550,000	435,300,000
2.1	Belanja Tidak Langsung	-191,055,000	250,351,000	191,055,000	298,645,000	931,106,000
2.2	Belanja Langsung	161,810,500	396,562,750	1,294,625,250	2,845,233,500	4,698,232,000